

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)
DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA KEBAKARAN
(STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ALFAIQ SHIDDIQ ZIKIR

NIM. 200405021

Prodi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

2024/1445 H

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Kesejahteraan Sosial

Oleh

Alfaiq Shiddiq Zikir
NIM. 200405021

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sa'i, S.H., M.Ag
NIP.196406011994021001

Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos
NIP.199007212020121016

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh :
ALFAIQ SHIDDIQ ZIKIR
NIM. 200405021
Pada Hari/Tanggal

19 Juli 2024 M
Rabu, 13 Muharram 1446 H

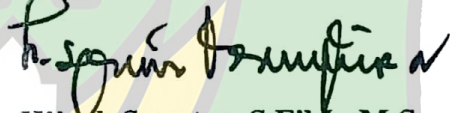
di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Drs. Sa'i, S.H., M.Ag
NIP.196406011994021001

Sekretaris,



Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos
NIP.199007212020121016

Penguji I,



Dra. Munawiah, M.Hum
NIP.196806181995032003

Penguji II,



Wirda Amalia, M.Kesos
NIP.198909242022032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP.196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Alfaiq Shiddiq Zikir

NIM : 200405021

Jenjang : Strata satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 19 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Alfaiq Shiddiq Zikir

ABSTRAK

Kebakaran adalah bencana yang sering terjadi di Kota Banda Aceh, menurut data kebakaran merupakan salah satu bencana yang terbesar di Aceh. Bencana ini sering menimpa wilayah padat penduduk. Setiap kebakaran pasti merugikan penduduk secara materil dan immateril yakni trauma kejiwaan atau gangguan psikologis, tentu hal ini menjadi perhatian penting sebagai akibat kebakaran di Kota Banda Aceh. Sebagai perpanjangan tangan dari BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Terdapat BPBA yang bertugas mengedukasi masyarakat di bidang kebencanaan termasuk kebakaran. Maka dari itu seharusnya BPBA berperan aktif dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran BPBA dalam pengurangan resiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh. Untuk menjawab pertanyaan itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah diadakannya penelitian ini, ditemukan bahwa BPBA telah melaksanakan tugas mereka dengan benar, BPBA bersama BPBD dan pihak terkait telah menjadi koordinator secara langsung dalam edukasi dan penanggulangan resiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh dan juga BPBA melaksanakan perannya sebagai *Policy creator, Fasilitator, Implementer, dan Akselerator* disetiap fase kebencanaan. Namun masih ada beberapa kekurangan yang terjadi dalam hal koordinasi antara BPBA dan BPBD, selain itu kurangnya personel yang terampil dalam hal kebakaran dan alat yang kurang memadai di BPBA.

Kata Kunci : *Banda Aceh, BPBA, Kebakaran, Resiko Bencana*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya, aatas nikmat dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) yang berjudul **“Peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Studi Kasus Di Kota Banda Aceh”**. Penulis merasa bahwa skripsi ini belum mencapai taraf yang sempurna, karena itu kritik dan saran dari dosen pembimbing untuk perbaikan sangat kami harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga karya tulis ini dapat mencapai yang diharapkan. Hanya kepada Allah SWT kita bertawakkal dan mohon ampun dari segala dosa. Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang menjadi bahan bakar semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada ibunda Misnawati yang telah mendidik, membesarkan serta memberikan dukungan dan motivasi, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta lantunan doa yang begitu kuat untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Begitu juga

kepada adik perempuan satu-satunya yakni Assyfa Adelya Zulfa yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

2. Kepada Dr. Kumawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Kepada bapak Drs. Sa'i, S.H., M.Ag sebagai pembimbing I, penulis mengucapkan terimakasih telah meluangkan waktu dan memberi arahan serta bimbingan kepada penulis.
4. kepada bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, mencurahkan ide, memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos, Ph.D selaku ketua prodi beserta staff prodi Kesejahteraan Sosial yang telah menuntun penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik, mengajar dan membekali ilmu kepada penulis selama menjalani pendidikan di prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.
7. Kepada bapak Ahmad Fauzi, S.Sos, MM yang telah senantiasa membantu penulis dalam proses penelitian dilapangan serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya khususnya teman-teman Kos Yah Muda yang telah membantu penulis dari masa kuliah, penelitian, hingga skripsi ini selesai.

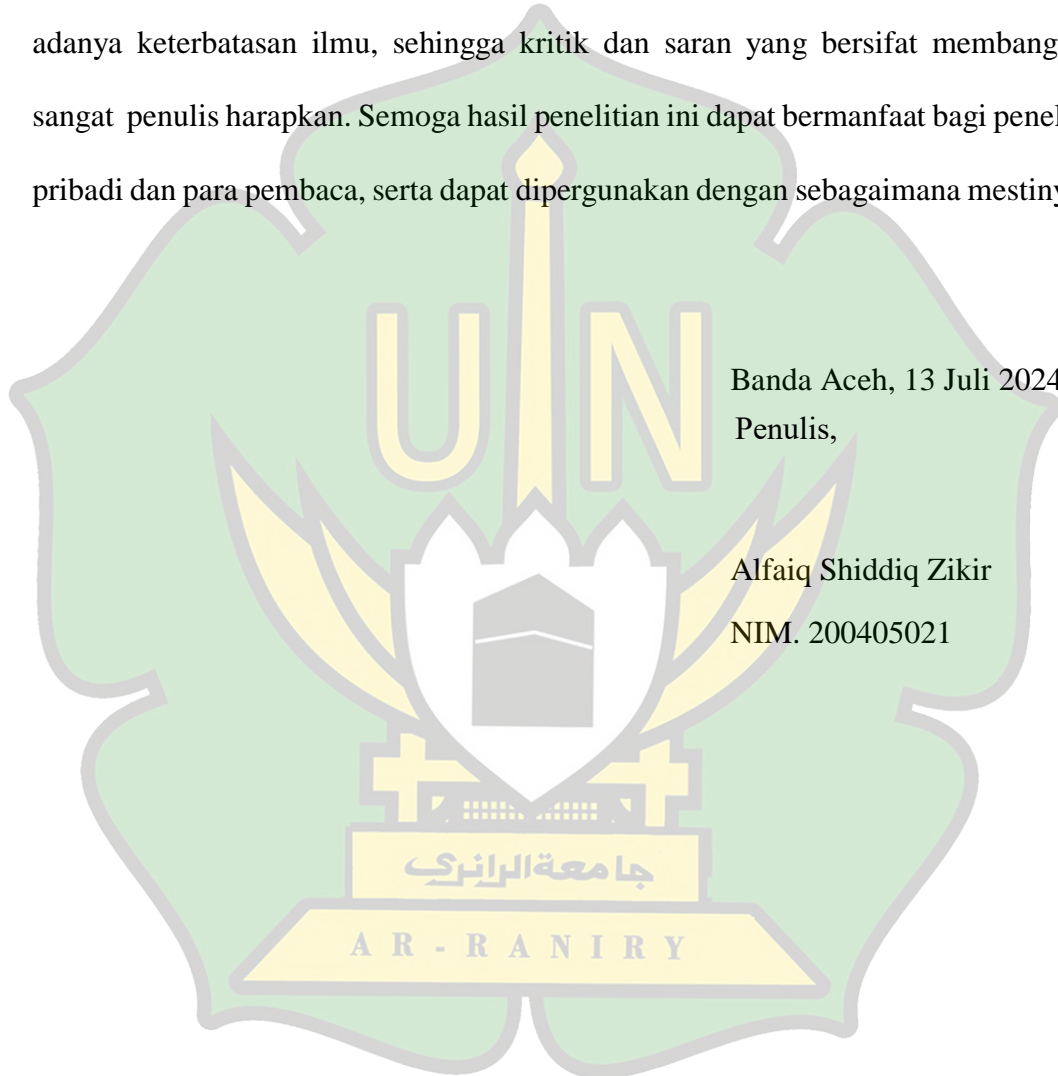
Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir. Walaupun banyak pihak yang mendukung, memberi saran dan mendoakan peneliti, Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan ilmu, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti pribadi dan para pembaca, serta dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 Juli 2024

Penulis,

Alfaiq Shiddiq Zikir

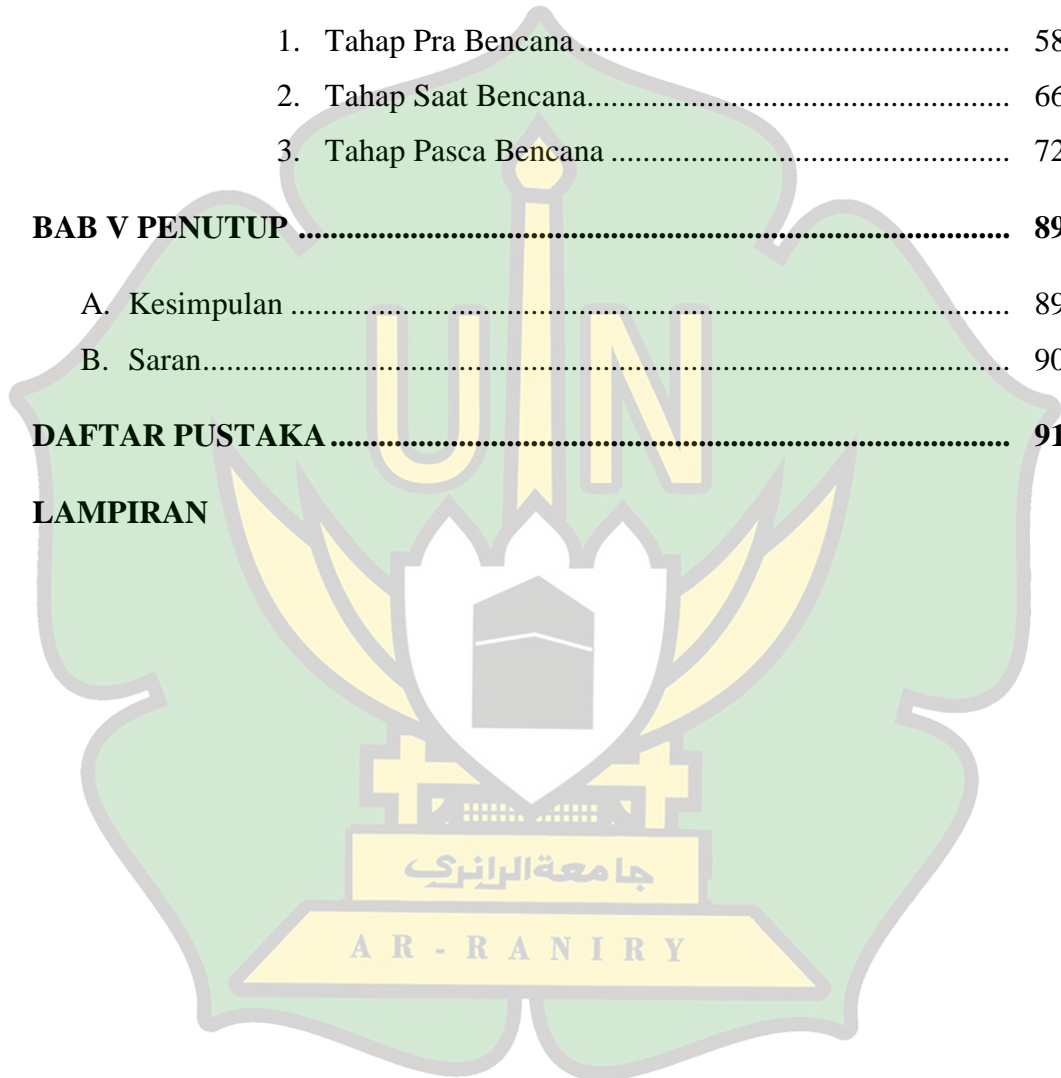
NIM. 200405021



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	12
B. Teori Peran.....	17
C. Bencana.....	23
D. Pengurangan Resiko Bencana (PRB).....	26
E. Kebakaran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42

BAB IV UPAYA BPBA DALAM MENANGGULANGI BENCANA KEBAKARAN DI KOTA BANDA ACEH	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Pelaksanaan Program BPBA Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Kota Banda Aceh	53
1. Tahap Pra Bencana	58
2. Tahap Saat Bencana.....	66
3. Tahap Pasca Bencana	72
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	



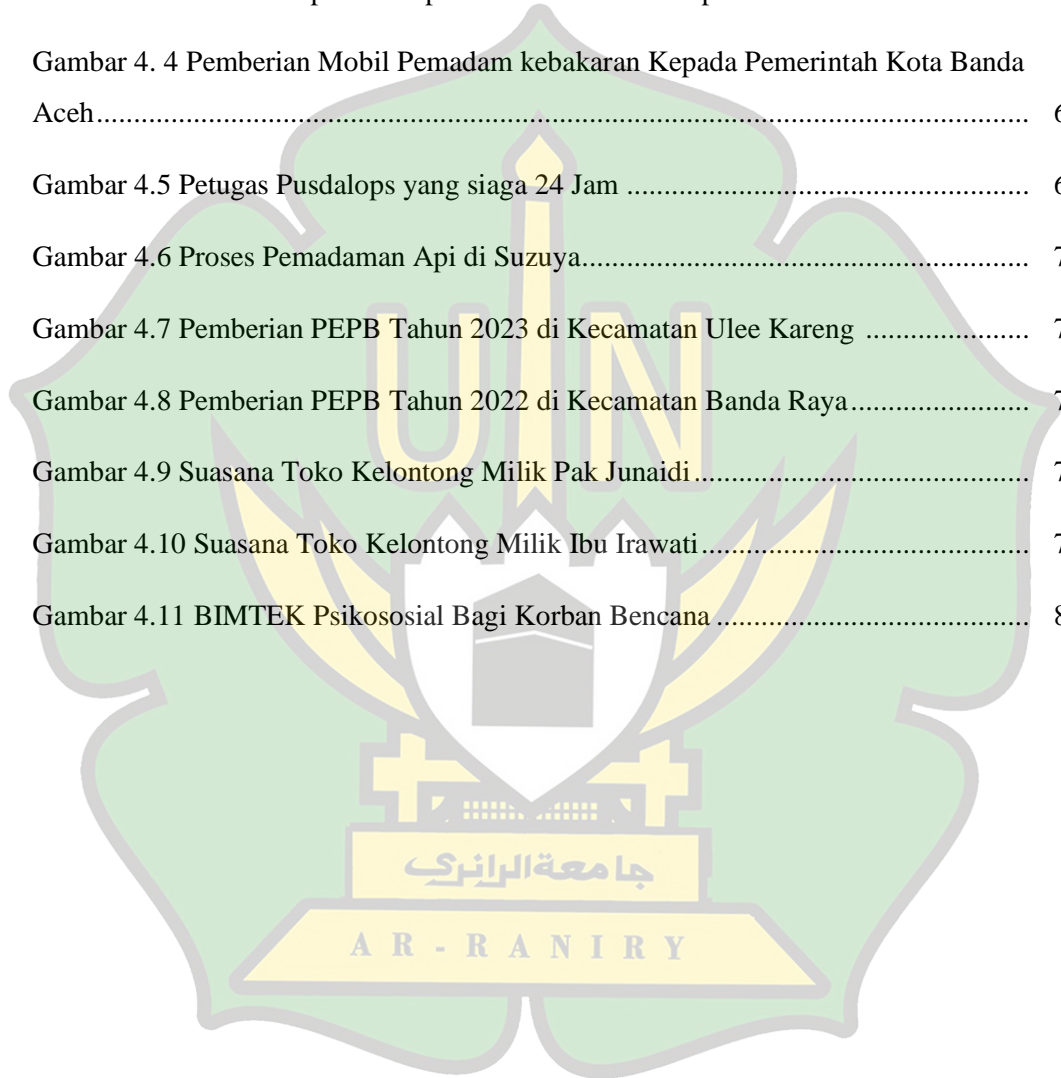
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data bencana kebakaran di Kota Banda Aceh tahun 2023	4
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh.....	52
Gambar 4.2 Program SMAB di Sekolah MAN 1 Banda Aceh.....	60
Gambar 4.3 Pemberian peralatan pemadam kebakaran kepada Kota Banda Aceh	62
Gambar 4. 4 Pemberian Mobil Pemadam kebakaran Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh.....	62
Gambar 4.5 Petugas Pusdalops yang siaga 24 Jam	68
Gambar 4.6 Proses Pemadaman Api di Suzuya.....	70
Gambar 4.7 Pemberian PEPB Tahun 2023 di Kecamatan Ulee Kareng	75
Gambar 4.8 Pemberian PEPB Tahun 2022 di Kecamatan Banda Raya.....	75
Gambar 4.9 Suasana Toko Kelontong Milik Pak Junaidi.....	76
Gambar 4.10 Suasana Toko Kelontong Milik Ibu Irawati.....	76
Gambar 4.11 BIMTEK Psikososial Bagi Korban Bencana	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai entitas bio-psiko-sosial, menjalani kehidupan sehari-hari yang melibatkan dinamika aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kehidupan sehari-hari ini adalah untuk berinteraksi dengan sesama dan lingkungan sekitar. Namun dalam banyak situasi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dapat muncul dan mengakibatkan disfungsi sosial, salah satu kendala tersebut adalah bencana. Secara umum bencana dapat timbul akibat peristiwa alam maupun perbuatan manusia, baik yang terjadi secara tiba-tiba maupun dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan harta benda, dan kerusakan lingkungan, yang seringkali membebani masyarakat dan segala sumber dayanya.¹

Salah satu bencana yang masih sering dialami oleh masyarakat adalah bencana kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, "kebakaran dikategorikan sebagai jenis bencana alam sekaligus bencana non-alam berdasarkan penyebab terjadinya."² Artinya bencana kebakaran ini diakibatkan oleh faktor alam itu sendiri dan juga bisa disebabkan oleh kelalaian manusia atau non-alam. Kebakaran merupakan salah satu bentuk bencana

¹ Ismail Suardi , *Mitigasi Bencana*, (Jawa Barat: CV.Adanu Abimata, 2021), hal. 2.

² UU No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

yang berpotensi besar untuk menimbulkan kerugian yang signifikan apabila tidak ditangani dengan serius.

Kasus kebakaran ini umumnya menjadi salah satu bencana yang sering terjadi khususnya di daerah permukiman padat penduduk seperti perkotaan, jumlah kepadatan populasi yang cukup tinggi dapat berdampak pada keseimbangan perkotaan. Peningkatan populasi kota akan menyebabkan pertumbuhan sektor perumahan di dalamnya, sehingga menghasilkan pengembangan pemukiman yang lebih padat.³ Padatnya penduduk diperkotaan inilah yang menjadi faktor resiko daerah perkotaan untuk terjadinya bencana kebakaran. Penyebabnya adalah karena wilayah perkotaan menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, kompleksitas penggunaan lahan, konsentrasi aktivitas penduduk, pemanfaatan material bangunan, dan keberadaan daerah-daerah pemukiman yang tidak teratur di perkotaan.⁴

Di provinsi Aceh kasus kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering dihadapi oleh penduduk Aceh setiap tahunnya. Menurut data yang diperoleh dari sumber Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pada tahun 2023 terdapat sebanyak 303 kejadian bencana alam di Aceh, di mana diantaranya kasus kebakaran permukiman yang tertinggi dengan jumlah sebanyak 113 kejadian dan membakar 275 rumah. Selama periode tahun 2019 hingga 2022, kejadian bencana

³ Bambang Irawan, dkk , 'Mitigasi Bencana Kebakaran Kawasan Perkotaan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 14.4 (2023), 476, hal. 479.

⁴ Asep, P , dkk , 'Kerentanan Bahaya Kebakaran Di Kawasan Kampung Kota Kasus: Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung ', *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 2.1 (2019), 32–45, hal. 32.

kebakaran permukiman masih menjadi tren yang dominan di Aceh, terutama di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi.⁵

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Provinsi Aceh. Menurut Badan Pusat statistik Provinsi Aceh tahun 2022, jumlah penduduk Kota Banda Aceh adalah 257.635 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.199 jiwa/km² dengan luas wilayahnya sekitar 61,36 km².⁶ Peningkatan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh semakin meningkat, sebagian besar disebabkan oleh adanya migrasi dan perpindahan penduduk dari wilayah lain. Adanya fenomena migrasi ini menciptakan permintaan kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat di Kota Banda Aceh.

Menurut data badan pusat statistik Kota Banda Aceh setidaknya kejadian kebakaran di Kota Banda Aceh dari tahun 2019 sampai tahun 2022 tercatat ada sebanyak 210 kasus kebakaran yang terjadi di Kota Banda Aceh.⁷ Ini menunjukkan bahwa angka kebakaran di Kota Banda Aceh masih relatif tinggi. Adapun faktor utama dari kebakaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh kelalaian manusia. Kebanyakan kasus kebakaran yang terjadi di Kota Banda Aceh disebabkan oleh arus pendek dari listrik, kebocoran gas atau kompor, pembakaran sampah, dan puntung rokok. Berkenaan dengan itu berikut bencana kebakaran yang sudah terjadi pada tahun 2023 :

⁵ "Data Dan Infografis Bencana" <https://bpba.acehprov.go.id/halaman/data-dan-infografis-bencana> (Diakses pada 06 Maret 2024)

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. *Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Aceh (2022)*.

⁷ "Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023" (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh,2023), hal. 235-236

Tabel 1.1 Data bencana kebakaran yang terjadi di Kota Banda Aceh tahun 2023

No	Tanggal	Tempat	Penyebab	Dampak
1	22 Januari 2023	Kuta Alam	Api dari arus pendek listrik	Dua unit ruko terbakar dan perkiraan kerugian total Rp. 200,000,000.
2	02 Februari 2023	Syiah Kuala	Percikan Api Las yang mengenai barang	Satu Unit ruko terbakar dan perkiraan kerugian total Rp. 25,000,000.
3	16 Maret 2023	Baiturrahman	Api dari arus pendek listrik	Satu unit rumah singgah hangus terbakar dan perkiraan kerugian total Rp. 200,000,000.
4	23 Maret 2023	Kuta Alam	Belum di ketahui	Satu unit rukoh terbakar dan mengalami kerugian materi lainnya.
5	27 Maret 2023	Kutaraja	Api berasal dari kompor dapur	Dua unit rumah singga terbakar dan perkiraan kerugian total Rp. 200,000,000.
6	11 Juni 2023	Baiturrahman	Belum Diketahui	Satu gudang toko kopi terbakar dan mengalami kerugian materi lainnya.
7	12 Juni 2023	Lueng Bata	Api berasal dari mobil fuso	Satu unit gudang dan dua unit mobil fuso terbakar dan perkiraan kerugian total Rp. 3,290,000,00.
8	15 Juni 2023	Kuta Alam	Api dari arus pendek listrik	Tiga rumah singgah terbakar dan perkiraan kerugian total Rp. 600,000,000.
9	13 Juli 2023	Baiturrahman	Api dari arus pendek listrik	Satu kantor keuchik terbakar dan mengalami kerugian materi lainnya.
10	17 Juli 2023	Syiah Kuala	Pembakaran sampah	Satu rukoh terbakar dan mengalami kerugian materi lainnya.

10	25 Juli 2023	Lueng Bata	Puntung Rokok	Satu gudang terbakar dan perkiraan kerugian total Rp. 100,000,000.
11	19 September 2023	Lueng Bata	Puntung Rokok	Delapan unit rumah singgah, 6 KK, 22 Jiwa terpaksa mengungsi dan mengalami kerugian materi lainnya.
12	12 Oktober 2023	Jaya Baru	Belum Diketahui	Dua rumah singgah terbakar dan mengalami kerugian lainnya.

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

Berdasarkan data tersebut bahwa dampak dari bencana kebakaran dapat menyebabkan kerugian bagi para korban, termasuk kerugian materi seperti kehilangan harta benda dan rumah yang hancur terbakar. Selain itu dampak dari kebakaran ini juga berpengaruh pada psikologis korban, beberapa di antaranya merasa putus asa, korban yang terdampak tidak bisa bersekolah, tidak dapat bekerja, dan keterbatasan dalam beraktivitas seperti biasanya dan pasca kebakaran, para korban hanya dapat mengumpulkan reruntuhan sisa-sisa rumah yang telah hangus terbakar.

Selanjutnya jika melihat data tersebut juga dapat gambarkan bahkan permasalahan terbesar terjadinya kebakaran di Kota Banda Aceh ialah faktor kelalaian manusia, yang dimana kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kebakaran. Maka dengan ini perlu adanya edukasi secara menyeluruh terhadap masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran. Adapun terkait individu yang terkena dampak bencana kebakaran ini, tentunya memerlukan upaya pemulihan pascabencana, yakni upaya yang meliputi

rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya setiap wilayah memiliki perencanaan penanggulangan bencana dalam upaya mitigasi. Undang - undang ini mencakup ketentuan penting dalam penanggulangan bencana, yang merupakan tanggung jawab dan wewenang bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya tersebut harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan komprehensif. dan menyeluruh.

Maka dari itu, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengawasi expositions penanggulangan bencana. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan penanggulangan bencana, penentuan status bencana di tingkat nasional dan local, dan penetapan peraturan untuk menerapkan teknologi untuk mengeluarkan peringatan bahaya.

Demikian pula peranan yang telah dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sebagai sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di Provinsi Aceh. BPBA terlibat dalam beberapa tahap penanggulangan, mencakup tahap pra bencana seperti upaya mitigasi melalui sosialisasi mengenai bencana kebakaran. Selama tahap bencana, seperti dalam kondisi tanggap darurat, BPBA segera mengirimkan tim pemadam ke lokasi kebakaran. Sementara pada tahap pasca bencana, BPBA terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Provinsi Aceh memegang peran krusial dalam upaya mengurangi risiko kebakaran di setiap daerah yang ada di Aceh termasuk di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui serta mengkaji bagaimana peran BPBA dalam mengurangi resiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana kebakaran. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Studi Kasus Di Kota Banda Aceh”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana peran BPBA dalam mengurangi resiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tentunya ada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui peran BPBA dalam mengurangi resiko bencana kebakaran Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan kajian di bidang ilmu kebencanaan secara spesifik mengenai informasi tentang apa yang

dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam mengurangi resiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penulis secara mendalam dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan lapangan.

b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Kajian ini berupaya memberikan wawasan kepada instansi pemerintah terkait dan masyarakat untuk meningkatkan upaya pengurangan risiko kebakaran di Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Peran

Makna peran merujuk pada sekelompok tingkat diharapkan yang seharusnya dimiliki oleh individu yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan, dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat dan harus dilaksanakan.⁸

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2007), hal. 845.

Pada penelitian ini, peran yang dimaksud yaitu dalam konteks ini mengacu pada tanggung jawab, tugas, dan fungsi spesifik yang dilakukan oleh BPBA dalam mengelola, mencegah, dan merespons risiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh. Ini mencakup peran koordinasi, perencanaan, dan implementasi program mitigasi dalam pengurangan risiko.

2. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) merupakan institusi yang dibentuk untuk menangani tugas dan fungsi penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Aceh. Meskipun BPBA telah berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi tugas pokok dan tanggung jawabnya sejak didirikan pada tanggal 22 Juni 2010, mengingat kapasitasnya yang terbatas, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Masukan dan saran dari berbagai mitra menunjukkan bahwa masih banyak hal yang memerlukan perhatian untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan tugas tersebut.⁹

Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam penelitian ini, merupakan lembaga non-departemen yang berperan penting dalam penelitian ini.

⁹ “Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Aceh”, <https://bpba.acehprov.go.id/halaman/sejarah-badan-penanggulangan-bencana-aceh> (diakses pada 04 Februari 2024).

3. Pengertian Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana untuk menganalisis dampak risiko bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Meskipun telah terjadi kemajuan dan pencapaian dalam membangun ketangguhan bangsa melalui upaya PRB setelah pelaksanaan berbagai langkah penanggulangan bencana di Indonesia, namun perlu pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pencapaian PRB tidak hanya mengurangi risiko yang ada, tetapi juga mampu mencegah timbulnya risiko-risiko baru.¹⁰

Pengurangan risiko bencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengurangan risiko bencana dari terjadinya kebakaran dimulaid dari pasca bencana, saat terjadi bencana, dan pra bencana kebakaran yang dapat menyebabkan kerugian terhadap manusia, harta benda, dan lingkungan.

4. Kebakaran

Kebakaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah sebuah peristiwa terbakarkan sesuatu hal yakni rumah, hutan, dan lain sebagainya. Adapun kebakaran dalam kebencanaan ialah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan.

¹⁰ “Peringatan Bulan PRB Tahun 2022”, <https://bnpb.go.id/bulanprb2022> (diakses pada 04 Februari 2024).

Kebakaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bencana kebakaran rumah atau permukiman yang terjadi di perkotaan padat penduduk di Kota Banda Aceh.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Melalui penelusuran dan riset yang dilakukan, peneliti menemukan kajian-kajian sebelumnya baik melalui sumber internet maupun literatur, penelitian terdahulu yang penulis temukan memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, meskipun memiliki perbedaan dalam sudut pandang dan pendekatan analisis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berhasil di temukan oleh penulis:

Penelitian dari Dea Riska yang berjudul “Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta Barat” tahun 2020.¹¹ Fokus utama dari skripsi ini adalah untuk mengkaji peran BPBD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran di Krukut Tamansari, Jakarta Barat, serta dampaknya terhadap para korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Informan terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, UPT Pusat Data dan Informasi, Kepala Subbagian Kepegawaian di lingkungan BPBD Provinsi DKI, Ketua RW 05, dan korban bencana kebakaran. Temuan menunjukkan bahwa BPBD berfungsi secara langsung dan tidak langsung sebagai koordinator, bekerja sama dengan SKPD dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Instansi

¹¹ Dea Riska, “Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta Barat”, *skripsi Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Uin Jakarta, 2020).

yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, PMI, PLN, LSM, BAZNAS, tokoh agama, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas bencana kebaran dengan lebih spesifik tentang pelaksanaan peran lembaga penanggulangan bencana tingkat provinsi dalam menanggulangi resiko kebakaran di perkotaan padat penduduk. Adapun perbedaan Dalam penelitian peneliti membahas tentang pengurangan resiko kebakaran dimulai saat pra bencana, saat terjadi bencana, hingga kepada pasca bencana. Serta peneliti membahas juga apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran.

Penelitian dari Marshela Manurung yang berjudul “Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan”, tahun 2023.¹² Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah untuk mengetahui tentang efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin dan mengetahui faktor yang menjadi penghambat efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman Kota Banjarmasin. Informan meliputi Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota

¹²Manurung Marshela, “fektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan”, *skripsi Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik FPM* (Kalimantan Barat: IPDN, 2023).

Banjarmasin, Kepala Bidang Pencegahan, Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penanganan bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, telah mencapai tingkat efektivitas yang memadai dalam mencapai tujuannya. Meskipun demikian, kendala muncul dalam proses pemadaman bencana kebakaran di permukiman, terutama pada lokasi yang padat lalu lintas dan sulit diakses akibat kondisi jalan yang tidak mendukung. Meskipun integrasi telah berjalan dengan efektif, adaptasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemadaman dan penyelamatan di permukiman masih terkendala. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang memadai akibat pembatasan anggaran yang ada.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang penanggulangan bencana kebakaran permukiman di perkotaan oleh suatu lembaga penanggulangan bencana, dan melihat bagaimana faktor penghambat dalam proses penanggulangan bencana kebakaran. Adapun perbedaan Dalam penelitian peneliti membahas tentang peran suatu lembaga penanggulangan daerah tingkat Provinsi serta menutupi kekurangan penelitian sebelumnya yang kurang mendalam membahas tentang penanggulangan pasca bencana kebakaran.

Penelitian dari Bambang Irawan, dkk yang berjudul “Mitigasi Bencana Kebakaran Kawasan Perkotaan”, tahun 2023.¹³ Fokus masalah yang diteliti adalah untuk mendeskripsikan upaya mitigasi bencana kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Bontang. Informan meliputi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, Kepala Bidang Fasilitasi dan Pencegahan, Kepala Sekdi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya mitigasi terhadap bencana kebakaran yang diterapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Bontang telah dijalankan dengan baik, meskipun masih belum mencapai tingkat optimal. Evaluasi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana telah berlangsung secara efektif. Dalam upaya penanggulangan bencana, dilakukan perencanaan partisipatif dengan melibatkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan di Bontang. Untuk meningkatkan kesadaran akan bencana, diterapkan pengembangan budaya sadar bencana melalui program pendidikan dan pelatihan yang dimulai sejak dini. Upaya pengawasan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi berkala. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan meliputi keterbatasan tenaga penyuluh lapangan, terbatasnya jumlah inspektur kebakaran, kurangnya pengawasan dan evaluasi dari pihak atasan, ketiadaan Rencana Induk Proteksi Kebakaran yang mencakup peta rawan kebakaran dan data wilayah manajemen

¹³Bambang Irawan, dkk , ‘Mitigasi Bencana Kebakaran Kawasan Perkotaan’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 14.4 (2023), 476.

kebakaran, absennya standar operating system dalam mitigasi kebakaran, serta keterbatasan fasilitas tempat penyuluhan.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama- sama membahas tema penanggulangan bencana kebakaran di perkotaan oleh suatu lembaga penanggulangan bencana dan sama-sama membahas tentang faktor penghambat dalam proses penanggulangan bencana kebakaran . Adapun perbedaan Dalam penelitian peneliti membahas tentang peran lembaga penanggulangan daerah tingkat Provinsi dalam pengurangan resiko kebakaran dimulai saat pra bencana,saat terjadi bencana, hingga kepada pasca bencana.

Dan penelitian dari Eka Septianti, dkk yang berjudul “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mengurangi Resiko Bencana Kebakaran di Wilayah Kabupaten Nias”, tahun 2022.¹⁴ Fokus masalah yang diteliti bahwa strategi program melibatkan pembentukan program dengan melibatkan beberapa pihak terkait dan memperhatikan tiga aspek utama, yakni preventif, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Adapun strategi sumber daya melibatkan pelaksanaan pelatihan dan bimtek guna meningkatkan kemampuan aparatur, serta menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pertama, upaya penggalangan sumber daya manusia yang bersatu dalam membantu pemerintah untuk mengurangi risiko bencana kebakaran melalui partisipasi masyarakat atau tim relawan, serta kerjasama antar instansi. Kedua, penerapan sistem informasi yang memanfaatkan

¹⁴ Eka Septianti , dkk . ‘Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mengurangi Resiko Bencana Kebakaran Di Wilayah Kabupaten Nias’, *Jurnal Manajemen*, 1.3 (2022), 416–25.

perangkat teknologi untuk menyediakan data dan informasi terkait bencana, khususnya kebakaran. Di sisi lain, faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini juga terdiri dari dua aspek. Pertama, kondisi iklim dengan curah panas yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebakaran. Kedua, perilaku dan kelalaiian manusia dalam membuka lahan secara ilegal dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama- sama membahas tentang lembaga badan penanggulangan bencana dalam mengurangi resiko bencana kebakaran. Adapun perbedaan Dalam penelitian peneliti membahas tentang peran dari lembaga badan penanggulangan bencana Aceh dalam pengurangan resiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh.

B. Teori Peran

Teori peran adalah suatu konsep yang sering digunakan dalam bidang sosiologi, psikologi, dan antropologi yang mengintegrasikan berbagai teori, pendekatan, dan disiplin ilmu. Sebagai pemahaman konsep ini berbicara tentang peran sebagaimana yang sering terjadi dalam dunia teater, di mana seorang aktor diharapkan untuk mengambil karakter tertentu dan bertindak sesuai dengan karakter tersebut.¹⁵

¹⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal .215.

Dalam kerangka teori peran, terdapat harapan terhadap perilaku atau tindakan yang diinginkan dari pemegang kekuasaan tertentu yang telah ditetapkan. Terdapat empat aspek yang dikenali dalam teori peran ini:¹⁶

1. Individu yang terlibat dalam interaksi tersebut.
2. Perilaku yang muncul dalam konteks peran tersebut.
3. Posisi individu dalam konteks perilaku tersebut.
4. Hubungan antara individu dan perilaku.

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan atau posisi (*status*) seseorang. Ini mengindikasikan bahwa seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, maka individu tersebut telah memainkan suatu peran tertentu. antara peran dan status ini sama sama tidak bisa dipisahkan hal itu dikarenakan kedua hal ini saling berkaitan artinya tidak akan ada peran tanpa status dan begitu juga sebaliknya tidak akan ada status tanpa adanya peran. Sebagaimana suatu kedudukan, maka setiap individu memiliki berbagai macam peran yang berasal dari pola kehidupan sosial mereka. Ini juga berarti bahwa peran tersebut menentukan kontribusi mereka terhadap masyarakat serta kesempatan yang diberikan masyarakat kepada mereka. hal tersebut berarti sebuah peran memiliki peran yang signifikan dalam mengatur perilaku individu selain itu, peran memungkinkan seseorang untuk memprediksi perilaku orang lain dalam

¹⁶ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 9

batas-batas tertentu, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka sendiri dengan norma-norma sekelompoknya.¹⁷

Dari definisi teori peran di atas, dapat dipahami bahwa seseorang dapat dikatakan dapat memainkan peran jika telah memenuhi tanggung jawab dan tugasnya di dalam komunitas atau organisasi sesuai dengan kedudukan sosialnya. Dari pengertian tersebut, Peran dapat digambarkan sebagai perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan statusnya dan aturan masyarakat atau organisasi di mana ia berada. Peran-peran tersebut dipenuhi melalui interaksi antar individu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pada hakikatnya peran juga dapat dijelaskan sebagai serangkaian tindakan spesifik yang timbul dari posisi tertentu dalam konteks sosial. Dengan memperhatikan interaksi sosial individu dalam masyarakat yang terkait dengan cara tindakan dilakukan dalam struktur organisasi masyarakat, serta mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat sesuai dengan pengakuan atas status sosialnya. Terdapat tiga aspek utama peran, yaitu:¹⁸

1. Peran mencakup aturan-aturan yang terkait dengan posisi atau jabatan seseorang yang membimbing individu dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah ide perilaku yang dapat dijalankan oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari struktur organisasinya. Peran juga merupakan perilaku individu yang memegang peranan penting dalam struktur sosial masyarakat.

¹⁷ Narwoko, dkk, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.138.

¹⁸ Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

3. Peran diidentifikasi sebagai perilaku individu yang memiliki signifikansi penting dalam mengatur struktur sosial masyarakat.

Dalam pembahasan mengenai beragam peran yang diterapkan pada individu dalam masyarakat, terdapat beberapa pandangan terkait fungsi peran sebagai berikut:¹⁹

1. Sebuah pandangan menyatakan bahwa peran tertentu harus dijalankan agar struktur masyarakat dapat dipertahankan dan berkelanjutan.
2. Peran dapat diberikan kepada individu yang dianggap mampu oleh masyarakat untuk melaksanakannya, mereka adalah individu yang memiliki keterampilan dan kekuatan yang diperlukan.
3. Terkadang, ada individu tidak mampu memenuhi peran mereka sesuai dengan harapan masyarakat karena pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu besar dari kebutuhan pribadi mereka.
4. Masyarakat mungkin tidak akan memberikan peluang yang setara kepada individu yang mampu melaksanakan perannya. Bahkan, sering kali masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Adapun konsep peran dalam pemerintahan (*government*) dapat dipahami sebagai pengelolaan atau pengawasan yang memegang kewenangan atas kegiatan masyarakat dalam suatu negara, kota, atau entitas administratif lainnya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan

¹⁹ Narwoko, Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi Ketiga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal 160

legislatif. Sederhanaya jika dalam pengertian sempit pemerintahan hanya meliputi pada cabang kekuasaan eksekutif saja.²⁰

Oleh karena itu, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertujuan untuk memungkinkan intervensi pemerintah secara menyeluruh dalam penanggulangan bencana, yang mencakup kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan setelah bencana. Upaya kolektif ini, yang dikenal sebagai manajemen bencana, diarahkan pada pencegahan dan mengurangi resiko dampak bencana.

Menurut Nugroho jika dilihat dari segi peran yang dimainkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan koordinasi tugasnya, terdapat beberapa peran yang dijelaskan sebagai berikut:²¹

1. Pembuat Kebijakan (*Policy creator*) yang bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan.
2. Koordinator yang berfungsi untuk mengoordinasikan aktivitas dengan lembaga lain yang terlibat.
3. Fasilitator yang berperan dalam memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran.
4. Pelaksana (*Implementer*) yang bertugas melaksanakan kebijakan, termasuk membantu kelompok sasaran (korban bencana kebakaran).

²⁰ Tjandra, R, Hukum Sarana Pemerintahan. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 57.

²¹ Dea Riska, "Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta Barat", *skripsi* (Jakarta: Uin Jakarta, 2020), hal. 26.

5. Akselerator yang bertanggung jawab untuk mempercepat dan memberikan kontribusi agar program dapat mencapai sasaran dalam waktu yang sesuai atau bahkan lebih cepat.

Dalam pelaksanaannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memerlukan kontribusi dari pihak-pihak terkait atau stakeholder. Terkait dengan peran stakeholder dalam manajemen bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menguraikan bahwa stakeholder yang terlibat meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta lembaga swasta seperti lembaga usaha dan lembaga internasional. Keterlibatan semua lembaga pemerintah dalam upaya mitigasi bencana kebakaran tersebar di hampir semua unit, baik di tingkat kementerian maupun di lembaga non-kementerian. Ini menunjukkan bahwa setiap lembaga memiliki kontribusi dalam mitigasi bencana kebakaran. Selain itu peran lembaga swasta dan internasional dalam mitigasi bencana kebakaran meliputi berbagai kegiatan seperti menggalang bantuan untuk korban bencana kebakaran, mendukung proses pemulihan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana, serta menyediakan data berdasarkan penelitian independen yang dilakukan oleh lembaga terkait.²²

Secara keseluruhan dapat di pahami bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang

²² Suleman, S. A., & Apsari, N. C. Peran stakeholder dalam manajemen bencana banjir. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1),(2017) 53-59. hal. 56-57.

karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut. Dan apabila dihubungkan dengan lembaga Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam dalam penanggulangan bencana, maka peran bukan merupakan suatu hak dan kewajiban dari BPBA, melainkan peran merupakan tugas dan wewenang BPBA menanggulangi bencana sebagai bentuk sebuah status sosial dalam masyarakat.

C. Bencana

Terdapat beragam pengertian atau definisi mengenai "bencana", yang umumnya mencerminkan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana pada manusia, dampak pada struktur sosial, kerusakan pada infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat yang timbul akibat dari bencana. Namun secara keseluruhan, bencana merupakan kejadian atau serangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan atau faktor manusia, yang berdampak pada terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian material, dan dampak psikologis.²³

Dapat digeneralisasi bahwa untuk diklasifikasikan sebagai bencana, suatu peristiwa harus memenuhi beberapa kriteria atau kondisi berikut:

1. Adanya peristiwa,
2. Penyebabnya bisa berasal dari faktor alam atau ulah manusia,
3. Terjadi secara tiba-tiba, namun juga bisa bertahap secara perlahan,

²³ Ramli, Soehatman, *Manajemen Bencana*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal. 15.

4. Mengakibatkan kerugian dalam bentuk hilangnya nyawa manusia, kerugian harta benda, dampak sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, dan sebagainya,
5. Masyarakat tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani dampaknya.²⁴

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa bencana adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan ancaman dan mengganggu kehidupan seseorang, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor ulah manusia. Peristiwa ini dapat mengakibatkan kerugian yang besar, termasuk hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis bagi individu yang terkena dampak.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, juga sudah di jelaskan secara umum tentang jenis jenis bencana yang dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

1. Bencana alam merupakan jenis bencana yang asal-usulnya, perilakunya, dan penyebabnya berasal dari lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, kekeringan, dan tsunami.
2. Bencana non alam adalah jenis bencana yang timbul akibat dari peristiwa bukan alam, termasuk dalam kategori kegagalan teknologi, kegagalan dalam proses modernisasi, dan wabah penyakit.

²⁴ Nurjanah, dkk , *Manajemen Bencana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 11.

3. Bencana sosial adalah salah satu bentuk bencana yang disebabkan oleh interaksi manusia, seperti konflik sosial antara kelompok atau dalam masyarakat.²⁵

Adapun menurut para ahli berdasarkan karakteristik jenis bencana dikelompokkan ke dalam enam kelompok berikut:

1. Kejadian geologis termasuk letusan gunung berapi, gempa bumi/tsunami, serta longsor/gerakan tanah.
2. Peristiwa hidrometeorologi meliputi banjir, banjir bandang, badai/angin topan, kekeringan, rob/air laut pasang, dan kebakaran hutan.
3. Bencana biologis mencakup epidemi dan penyakit pada tanaman/hewan.
4. Bencana akibat kegagalan teknologi termasuk kecelakaan/kegagalan di sektor industri, insiden transportasi, masalah dalam desain teknologi, dan kesalahan manusia dalam mengoperasikan perangkat teknologi.
5. Bencana lingkungan diantaranya lain pencemaran, abrasi pantai, kebakaran (*urban fire*), dan kebakaran hutan (*forest fire*).
6. Bencana sosial diantaranya antara lain konflik sosial, terorisme/ledakan bom, dan eksodus (pengungsian/berpindah tempat secara besar-besaran).²⁶

Mengenai dampak yang ditimbulkan oleh bencana yakni merujuk pada semua perubahan atau kerugian yang terjadi akibat terjadinya bencana. Dampak yang mungkin dirasakan termasuk kerusakan atau kehilangan harta benda, luka-

²⁵ Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

²⁶ Nurjanah, dkk, *Manajemen Bencana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 20.

luka, kematian, gangguan terhadap gaya hidup, kerusakan infrastruktur, kerugian finansial, kehilangan pekerjaan, dampak psikologis, kehilangan tempat tinggal, dan gangguan terhadap sistem pemerintahan.²⁷

Dampak dari bencana beragam bergantung pada situasi dan kondisi, kerentanan lingkungan, dan masyarakat. Namun, terlepas dari itu bahwa dampak bencana yang pasti meliputi korban jiwa, luka-luka, pengungsian, kerusakan infrastruktur atau aset, kerusakan lingkungan atau ekosistem, implikasi politik, dampak terhadap hasil pembangunan, dan konsekuensi lainnya yang pada akhirnya dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Tingkat dampak bencana bergantung pada tingkat ancaman, (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) untuk penanggulangan suatu bencana.²⁸

D. Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

Asal-usul kata "risiko" dapat ditelusuri kembali ke kata Latin "risicum", yang awalnya muncul dalam konteks ekonomi, terutama perdagangan di sekitar laut tengah pada abad Pertengahan. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian dan kerusakan selama proses pengangkutan barang dagangan.²⁹

Interaksi antara faktor-faktor ancaman bencana dan tingkat kerentanan masyarakat dapat menempatkan masyarakat dan wilayah terkait pada tingkat risiko

²⁷ Kodoatie, dkk, *Pengelolaan Sumber Bencana Terpadu-Banjir, Longsor, Kekeringan dan Tsunami*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2006), hal. 146.

²⁸ Nurjanah, dkk, *Manajemen Bencana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.32.

²⁹ Heddy, dkk, *Respon Masyarakat Lokal Atas Bencana*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012), hal. 33.

yang berbeda. Keterkaitan antara ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas dapat dijelaskan dengan persamaan $Risiko = Bahaya \times Kerentanan$. Semakin besar ancaman bencana di suatu wilayah, semakin besar pula risiko terjadinya bencana di sana. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau populasi, semakin besar pula risiko yang dihadapi. Namun, sebaliknya, semakin besar kemampuan masyarakat, semakin kecil risiko yang dihadapi.³⁰

Dalam menghadapi potensi risiko bencana yang dapat terjadi kapan saja, masyarakat perlu memiliki kesiapsiagaan yang memadai. Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan diartikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah dampak bencana melalui organisasi yang efektif dan langkah-langkah yang tepat dan bermanfaat.³¹ Kesiapsiagaan bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dengan tujuan mengurangi jumlah korban, kerugian materiil, dan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Pengurangan risiko bencana (PRB) merujuk pada serangkaian langkah untuk mengurangi risiko bencana, yang melibatkan kesadaran masyarakat, peningkatan keterampilan dalam menghadapi ancaman bencana, atau penerapan tindakan fisik dan non-fisik oleh anggota masyarakat secara aktif, melalui partisipasi, dan terorganisir.³² PRB merupakan pendekatan terstruktur untuk

³⁰ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*, (Jakarta : BNPB, 2008), hal. 14.

³¹ UU No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

³² Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, *Pedoman Teknis Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB-BK)*, (Jakarta : Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum, 2013), hal. 3.

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko-risiko bencana. Tujuan dari PRB adalah untuk mengurangi kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan mengatasi ancaman lingkungan serta faktor risiko lain yang berkontribusi pada kerentanan.³³

Dalam kerangkanya PRB meliputi disiplin seperti manajemen bencana, yang dimana langkah-langkah harus mencakup dalam tiga tahapan diantaranya sebagai berikut :

1. Pra Bencana

- a. Kesiapsiagaan bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan respons efektif masyarakat selama bencana melalui perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan, pelatihan, simulasi, dan langkah-langkah pra bencana lainnya.
- b. Peringatan dini adalah langkah memberikan nasihat atau penyuluhan kepada masyarakat sebelum bencana terjadi, didasarkan pada informasi otoritas tentang potensi bencana, dan disampaikan kepada masyarakat.
- c. Mitigasi bencana merupakan usaha untuk mencegah atau mengurangi dampak yang timbul akibat bencana tertentu.

2. Saat Bencana

- a. Tanggap darurat bencana merujuk pada kegiatan yang dilaksanakan dengan segera saat terjadi bencana untuk mencegah timbulnya

³³ Usiono, dkk, *Disaster Management Perspektif Kesehatan dan Kemanusiaan*, (Medan : Perdana Puplicing, 2018), hal. 20.

dampak lebih lanjut, termasuk kegiatan penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, evakuasi korban, dan pemulihan infrastruktur dan fasilitas.

- b. Penanggulangan Bencana ialah tindakan yang dilakukan selama tanggap darurat, dimana usaha dilakukan untuk mengatasi bencana sesuai dengan jenis dan karakteristiknya, memerlukan keterampilan dan upaya yang sesuai dengan situasi dan skala peristiwa yang terjadi.

3. Pasca Bencana

- a. Rehabilitasi merujuk pada upaya perbaikan dan pemulihan layanan publik atau masyarakat setelah bencana, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi normal pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
- b. Rekonstruksi mengacu pada perencanaan dan implementasi kebijakan serta langkah-langkah konkret yang terencana dengan baik untuk membangun kembali infrastruktur, sarana, dan sistem kelembagaan secara permanen di wilayah pasca bencana. Tujuannya adalah untuk memulihkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, serta memperkuat hukum, ketertiban, dan peran masyarakat sipil di berbagai aspek kehidupan masyarakat.³⁴

Manajemen bencana menjadi penting karena tidak dapat diprediksi kapan dan seberapa parah dampak bencana akan terjadi. Konsep manajemen bencana

³⁴ IDEP, *Panduan Umum Penanggulangan Bencana* (Bali :Yayasan IDEP 2007), hal. 64.

dimulai dengan usaha untuk mengurangi dampak bencana sehingga pembangunan tidak harus dimulai dari awal dan masyarakat tidak terjerumus ke kondisi yang lebih buruk. Tujuan manajemen dalam mengurangi risiko bencana secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi atau menghindari kerugian fisik, ekonomi, dan kematian bagi individu, masyarakat, dan negara.
2. Mengurangi penderitaan yang dialami oleh korban bencana.
3. Memberikan perlindungan kepada pengungsi atau individu yang kehilangan tempat tinggal akibat ancaman bencana.
4. Mempercepat proses pemulihan atau pembangunan kembali infrastruktur yang terkena dampak bencana.³⁵

Demikian secara keseluruhan pemaparan tentang pengurangan resiko bencana (PRB) dapat di simpulkan bahwa PRB sebagai gagasan dan tindakan bertujuan untuk mengurangi risiko bencana melalui usaha-usaha terorganisir dengan menganalisis dan menekan faktor-faktor pemicu bencana. Mengurangi tingkat terpapar terhadap ancaman, menurunkan kerentanan manusia dan properti, manajemen yang efektif dalam pengelolaan tanah dan lingkungan, dan peningkatan kesiapan menghadapi dampak bencana merupakan beberapa contoh dari pengurangan risiko bencana. Ini mencakup manajemen bencana yang dimulai sebelum, selama, dan sesudah bencana.

³⁵ Adiyoso, *Manajemen Bencana Pengantar & Isu-Isu Strategis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hal. 72-73.

E. Kebakaran

Kebakaran diartikan sebagai suatu kejadian timbulnya api atau asap yang tidak terkontrol (liar) baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda. Kebakaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor manusia dan faktor alam. Bencana Kebakaran terbagi menjadi dua jenis yakni kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran gedung dan pemukiman. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia untuk perluasan lahan pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Di sisi lain, kebakaran gedung dan pemukiman seringkali terjadi karena kelalaian dalam konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan yang berlaku.³⁶

Dari Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebakaran merupakan kejadian di mana api atau asap tidak terkontrol muncul, baik itu dalam skala kecil maupun besar, yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Bencana kebakaran ini pun sangat mungkin terjadi mengingat kebakaran dapat disebabkan oleh dua faktor yakni oleh ulah manusia maupun faktor alam. Adapun kebakaran ini umumnya sering terjadi di kawasan permukiman terutama di perkotaan dengan kepadatan penduduk.

Secara umum ada dua kategori kebakaran, yakni kebakaran kecil dan kebakaran besar. Kebakaran kecil bisa diatasi oleh individu, kelompok, atau dengan bantuan petugas pemadam kebakaran menggunakan peralatan pemadam yang ada

³⁶ Weni R, dkk, *Seri Bencana Alam Kebakaran*, (Jakarta: PT. Mediantara Semesta, 2009), hal.4-5.

di sekitar lokasi. Di sisi lain, kebakaran besar memerlukan bantuan langsung dari petugas pemadam kebakaran yang terlatih karena ukurannya yang tidak dapat ditangani oleh warga atau peralatan pemadam kebakaran yang biasa digunakan untuk kebakaran kecil.³⁷

Kebakaran sering kali terjadi di kawasan pemukiman penduduk, dan seringkali rumah-rumah menjadi korban utama. Penyebabnya umumnya berasal dari masalah seperti ledakan kompor atau korsleting listrik. Besarnya kebakaran di area pemukiman bisa beragam, mulai dari hanya satu atau dua rumah yang terkena dampaknya. Namun, pada pemukiman yang padat, kebakaran tidak jarang merambah lebih dari puluhan bahkan ratusan rumah sekaligus.³⁸

Akibat dan kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran pemukiman menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap nyawa dan seringkali menimbulkan kerugian materi yang besar. Insiden seperti pembakaran fasilitas umum seperti pasar dapat mengganggu perekonomian banyak pedagang. Terlebih lagi, banyaknya kebakaran yang terjadi tidak hanya menghancurkan tempat tinggal pribadi tetapi juga gedung-gedung pemerintah dan fasilitas umum, yang menyebabkan hancurnya arsip dan dokumen yang penting agar bangunan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Untuk mengembalikan tujuan semula, baik melalui rekonstruksi atau rehabilitasi, diperlukan sumber daya keuangan yang besar.³⁹

³⁷ Purneyenti, *Banjir & Kebakaran Bencana Klasik Di Kota Besar*, (Bandung: Penerbit Duta, 2019), hal. 20.

³⁸ Napitupulu, *Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran Perusahaan*, (Bandung: PT Alumni, 2015), hal. 6.

³⁹ Sastradihardja, *Tanggap Bencana Kebakaran*, (Bandung: CV. Angkasa, 2021), hal 23

Konsep api adalah hasil dari oksidasi yang cepat pada materi dalam proses kimia pembakaran, menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai produk kimia lainnya. Api dapat berbentuk energi dengan intensitas yang bervariasi dan mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia dan panas yang menghasilkan asap. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan api:

1. Sumber panas seperti energi elektron (listrik statis atau dinamis), sinar matahari, reaksi kimia, perubahan kimia, gesekan (*friction*), pemadatan (*compression*), api terbuka (*open flame*), pembakaran spontan (*spontaneous combustion*), dan petir (*lightning*).
2. Material yang mudah terbakar seperti bahan kimia, bahan bakar, kayu, plastik, dan lainnya.
3. Ketersediaan oksigen di udara.⁴⁰

Unsur - unsur ini membentuk " segitiga api " Supaya api dapat menyala bahan bakar harus men- capai temperatur tertentu (disebut nyala) dan harus ada oksigen untuk bereaksi dengan bahan bakar . Jika salah satu unsur dari segi tiga api hilang , maka api tidak akan menyala. Hal yang demikian itu digunakan sebagai prinsip untuk mengatasi terjadinya kebakaran dan memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Dalam mengatasi api pada peristiwa kebakaran, kita harus bisa mengontrol Sumber panas dan Benda mudah terbakar.⁴¹

⁴⁰ Rinanto, *Bencana Kebakaran*, (Bandung: Pt.Graha Bandung Kencana, 2017), hal. 5.

⁴¹ Sastradihardja, *Tanggap Bencana Kebakaran*, (Bandung: CV. Angkasa, 2021), hal. 3.

Adapun terdapat klasifikasi dalam kebakaran berdasarkan penyebabnya yang terbagi dalam empat kelas diantaranya sebagai berikut :

1. Kelas A

Kebakaran yang termasuk kategori A adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda - benda padat , misalnya kertas , kayu , plastik , karet, busa dan benda - benda lain yang terbakar. Untuk memadamkan kebakaran ini , bisa menggunakan air , pasir , karung goni yang dibasahi , Alat Pemadam Kebakaran (APAR) atau racun api tepung kimia kering .

2. Kelas B

Kebakaran yang kategori B terjadi karena benda mudah terbakar seperti cairan (bensin, solar, minyak tanah, spirtus, alkohol, dll). Adapun Alat pemadam untuk kebakaran ini adalah pasir, (APAR), atau serbuk pemadam api kimia kering. Perlu diingat penggunaan air tidak dianjurkan karena dapat memperluas kebakaran.

3. Kelas C

Kebakaran kategori C ini disebabkan oleh korsleting listrik . Adapun alat pemadam untuk kebakaran ini ialah perangkat Alat Pemadam Kebakaran (APAR) atau racun api tepung kimia kering . Dan perlu diingat bahwa sebelum memadamkan kebakaran jenis ini , matikan dulu sumber listrik agar aman dalam memadamkan kebakaran yang terjadi .⁴²

⁴² Weni R, dkk, *Seri Bencana Alam Kebakaran*, (Jakarta: PT. Mediantara Semesta, 2009), hal. 24

Selanjutnya kejadian kebakaran bisa terjadi secara mendadak dan tak disengaja oleh siapa pun. Salah satu penyebab paling banyak adalah dikarnkan kelalaian manusia. Kelalaian, keteledoran, kecerobohan, dan ketidak pedulian sebagian orang dapat mengakibatkan bencana bagi banyak orang. Oleh karena itu, pentingnya sikap berhati-hati dalam mencegah kebakaran sangatlah penting. Berikut ini beberapa faktor penyebab terjadinya kebakaran :

1. Korsleting listrik

Kebakaran akibat korsleting listrik sering terjadi, terutama di daerah perkotaan dengan populasi yang padat dan penggunaan listrik yang luas. Korsleting terjadi ketika arus listrik terputus karena hubungan pendek. Ini bisa disebabkan oleh kabel listrik yang terkelupas dan bersentuhan atau bergesekan satu sama lain. Kabel bisa terkelupas karena gigitan binatang atau karena penuaan instalasi listrik.

2. Api Rokok

Api dari puntung rokok bisa menyebabkan kebakaran. Perokok sering kali membuang puntung rokok yang masih menyala di tempat sembarang. karna percikan api dapat meluas jika terkena benda yang mudah terbakar.

3. Kompor

Kompor atau alat masak bermacam macam jenisnya diantaranya kompor minyak, gas, listrik. Yang dimana ketiga macam kompor ini sama sama memiliki kerentanan terhadap kebakaran.

4. Pembakaran sampah

Pembakaran sampah di sekitar rumah tanpa adanya pengawasan dapat menimbulkan bencana kebakaran, yang dimana untuk meminimalisir kejadian ini, telah dirumuskan kebijakan terkait pembakaran sampah.

5. Bahan Peledak

Dampak ledakan dari petasan yang banyak dapat menciptakan situasi bencana. Kumpulan petasan yang terpapar oleh percikan api bisa meledak, yang pada akhirnya memicu kebakaran. Beberapa kasus kebakaran sudah tercatat akibat penggunaan petasan ini.

6. Sebab Lainnya

Ada banyak faktor lain yang juga dapat memicu terjadinya kebakaran. Contohnya, lampu minyak tanah, bahan kimia, kebocoran gas dari tabung, gudang senjata yang meledak, proses pengelasan dengan karbit atau listrik, semuanya berpotensi sebagai pemicu kebakaran.⁴³

⁴³ Purneyenti, Banjir & Kebakaran Bencana Klasik Di Kota Besar, (Bandung: Penerbit Duta, 2019), hal. 22-24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian mengacu pada suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data, yang selanjutnya dianalisis dan dijelaskan secara ilmiah dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan orientasi deskriptif, dimana peneliti berupaya mengkaji peran BPBA dalam pengurangan risiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh.

Penelitian kualitatif deskriptif dicirikan oleh tujuannya untuk memahami permasalahan yang ada melalui pengumpulan data, menyajikan gambaran deskriptif tentang situasi atau peristiwa yang diamati. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat digambarkan secara deskriptif hingga mencapai kejenuhan data. Metodologi penelitian meliputi observasi lapangan dan wawancara dengan anggota masyarakat, yang berpuncak pada perolehan temuan penelitian.⁴⁴

Jenis penelitian ini melibatkan metode studi kasus untuk mengidentifikasi secara instensif, detail, mendalam dan menyeluruh terkait bagaimana peran yang telah dilakukan BPBA dalam mengurangi resiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh. Adapun Pengambilan keputusan dalam pendekatan ini melibatkan penerbitan pernyataan kepada lembaga BPBA. Tujuannya untuk memastikan seluruh data dan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 8.

informasi terkait pengurangan risiko bencana kebakaran di BPBA terkumpul secara akurat dan menyeluruh.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Jl.T. Daud Beureueh, No. 18 dan juga di tempat warga yang terdampak bencana kebakaran yakni di Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng dan Gampong Kec.Banda Raya, Kota Banda Aceh.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Populasi mengacu pada sekelompok individu atau objek, yang mungkin memiliki jumlah terbatas atau tak terbatas. Populasi yang terbatas terdiri dari unsur-unsur yang dapat diidentifikasi atau diukur dalam batasan atau batasan tertentu. Sebaliknya, sampel mewakili sebagian dari populasi yang dimaksudkan untuk mencerminkan kelompok secara keseluruhan.⁴⁵

Pemilihan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Metode ini melibatkan pemilihan partisipan berdasarkan evaluasi terhadap pemahaman dan pengetahuan mendalam mereka tentang isu tersebut, serta kemampuan mereka dalam memberikan wawasan yang komprehensif tentang fenomena yang relevan dengan masalah penelitian. Kriteria sampel ditujukan kepada individu-individu yang terkait dengan keterlibatan BPBA dalam program pengurangan risiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh.

⁴⁵ Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Bandung: Bumi aksara,2004), hal. 101.

Adapun dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung dalam pengurangan resiko bencana kebakaran dan juga warga yang terdampak bencana kebakaran di Kota Banda Aceh. Pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan kriteria yang peneliti tentukan seperti yang disebutkan di bawah ini :

No	Informan	Jumlah
1	Bidang Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan (Bapak Ahmad Fauzi)	1 orang
2	Seksi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Bapak Yudhie Satria, dan Bapak Fazli)	2 orang
3	Seksi Bidang Kedaruratan dan Logistik (Bapak Amirullah)	1 orang
5	Seksi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi (Bapak Mukhsin Syafii)	1 orang
6	Korban Bencana Kebakaran sekaligus penerima manfaat dari program Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana (PEPB) Gampong Lambhuk (Bapak Junaidi) dan Gampong Geuceu Iniem (Ibu Irawati)	2 orang
Jumlah		7 orang

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian awal dari sumber data yang dipilih. Teknik-teknik ini mempunyai arti penting karena menentukan cara memperoleh data yang

kredibel untuk suatu penelitian.⁴⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu metode penting dalam pengumpulan data penelitian. Ini melibatkan tindakan aktif dan penuh perhatian dari peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis rangsangan atau fenomena yang diteliti. Teknik observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang keadaan atau perilaku objek yang menjadi fokus penelitian.⁴⁷

Selama proses observasi, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Mereka melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi lembaga atau lingkungan yang berkaitan dengan topik penelitian. Misalnya, dalam penelitian ini, peneliti mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk mengamati dan mencatat informasi terkait dengan program pengurangan risiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai metode untuk mengumpulkan data dan informasi, yang memungkinkan peneliti untuk menggali tidak hanya pengetahuan dan pengalaman permukaan dari subjek tetapi juga aspek yang

⁴⁶ Teguh, Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 133.

⁴⁷ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan, *Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 104.

lebih dalam dan tersembunyi. Melalui wawancara, peneliti dapat menanyakan tentang perspektif subjek di masa lalu, sekarang, dan bahkan masa depan. Wawancara kualitatif biasanya menggunakan panduan wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi dari para Informan.⁴⁸

Dalam kerangka penelitian ini, penulis menerapkan metode wawancara langsung sebagai instrumen utama pengumpulan data. Wawancara langsung memungkinkan penulis untuk berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, menanyakan pertanyaan yang relevan, dan secara langsung mencatat tanggapan yang diberikan, baik itu secara tertulis maupun dengan menggunakan alat perekam untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya oleh tim peneliti menjadi landasan dalam mengarahkan proses wawancara ini. Pedoman tersebut berisi daftar pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi yang diperlukan untuk penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan fokus pada staf Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dengan tujuan untuk memahami kontribusi dan peran yang dimainkan oleh BPBA dalam upaya pengurangan risiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang menyeluruh mengenai strategi, kebijakan, dan

⁴⁸ M. Djunaedi, dkk, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2012), hal. 48

upaya yang dilakukan oleh BPBA dalam mengurangi resiko bencana kebakaran.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan proses pengambilan informasi dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi umumnya termasuk dalam kategori data sekunder. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan berbagai macam informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen, foto-foto, artikel-artikel, serta catatan-catatan yang berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam upaya pengurangan risiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh. Melalui metode dokumentasi ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan data yang mendalam dan beragam, guna mendukung analisis dan kesimpulan penelitian yang akurat dan komprehensif.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan secara deskriptif, yang berarti peneliti berusaha untuk merangkum kembali informasi yang terkumpul mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam pengurangan risiko bencana di Kota Banda Aceh. Analisis data melibatkan proses pengorganisasian, penjabaran data ke dalam unit-unit, sintesis informasi, pengelompokan data ke dalam pola tertentu, seleksi data yang relevan, serta membuat kesimpulan yang

dapat disampaikan kepada pihak lain secara jelas dan terstruktur.⁴⁹ Adapun tahapan proses analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:⁵⁰

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh catatan lapangan berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan.

2. Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan pengelompokan dan penyederhanaan data mentah yang terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk memusatkan perhatian pada informasi yang paling relevan dan signifikan, sehingga memungkinkan pembuatan kesimpulan yang akurat dari penelitian yang dilakukan. Langkah ini melibatkan analisis yang cermat untuk memilih, menyusun, dan mengorganisir data secara efisien.

3. Penyajian Data

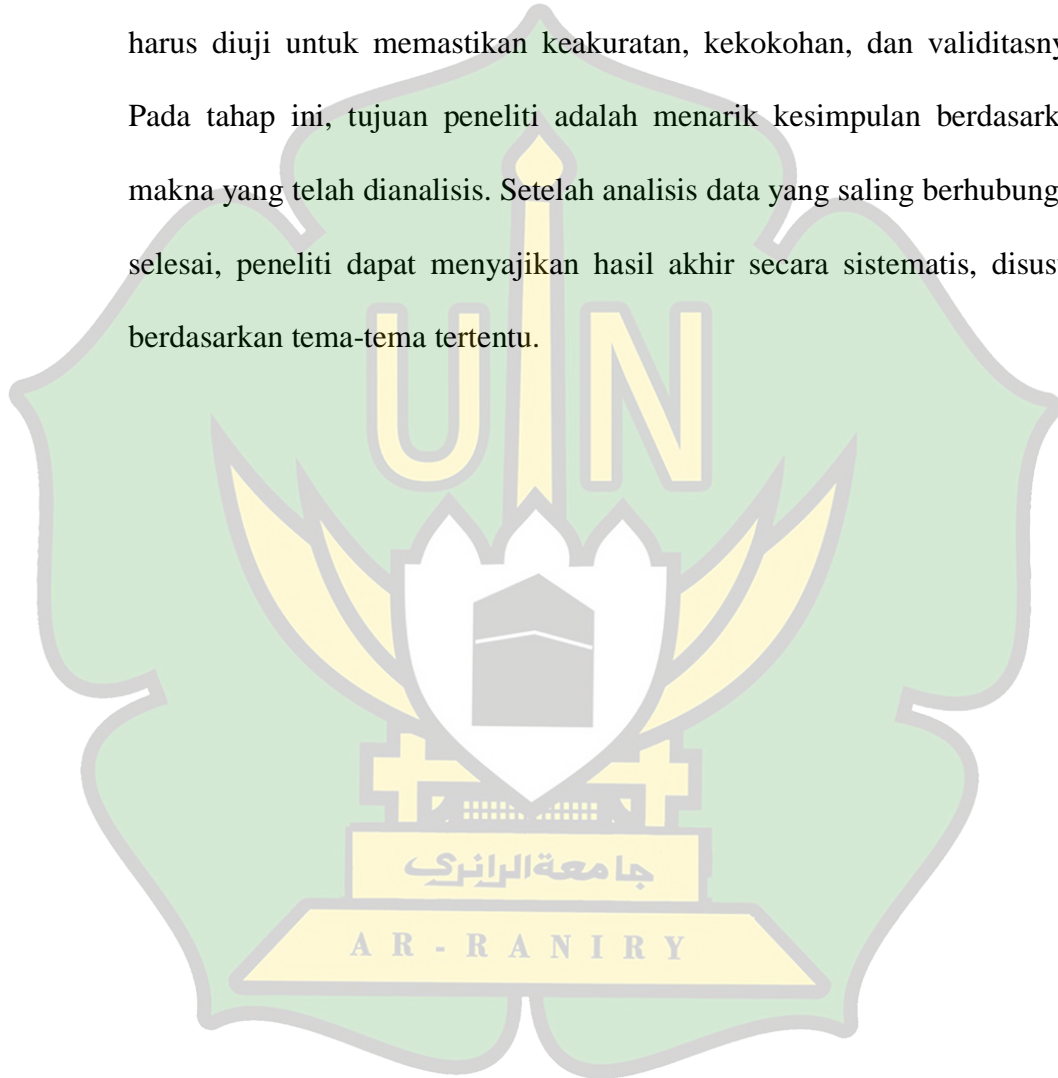
Penyajian data - melibatkan pengorganisasian informasi secara sistematis dan akurat untuk menarik kesimpulan, sehingga menghasilkan temuan yang diungkapkan melalui kata-kata dan kalimat yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Miles dan Huberman, “Data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif”.

⁴⁹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 88.

⁵⁰ Miles, M. B. dan Huberman, A, M, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1992), hal. 16.

4. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif melibatkan penyusunan deskripsi yang jelas dan rinci tentang temuan penelitian yang sebelumnya belum terdefinisi dengan baik. Setiap makna yang ditemukan harus diuji untuk memastikan keakuratan, kekokohan, dan validitasnya. Pada tahap ini, tujuan peneliti adalah menarik kesimpulan berdasarkan makna yang telah dianalisis. Setelah analisis data yang saling berhubungan selesai, peneliti dapat menyajikan hasil akhir secara sistematis, disusun berdasarkan tema-tema tertentu.



BAB IV

UPAYA BPBA DALAM MENANGGULANGI BENCANA KEBAKARAN DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BPBA Provinsi Aceh

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dibentuk sebagai tanggapan atas besarnya perhatian pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional terhadap bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004 di Aceh. Untuk mengatasi situasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005, membentuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Peran badan ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mendukung upaya penanggulangan bencana, dengan fokus utama pada pengurangan risiko bencana.

Dalam merespon terhadap sistem penanggulangan bencana pada waktu itu, Pemerintah Indonesia sangatlah berkomitmen untuk memperkuat aspek legalitas, institusi, dan alokasi anggaran. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 yang menetapkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terstruktur dengan Kepala serta unsur-unsur Pengarah dan Pelaksana dalam penanggulangan bencana. Fungsinya meliputi koordinasi penyelenggaraan kegiatan penanggulangan

bencana secara sistematis, terintegrasi, dan menyeluruh. Sebelum terbentuknya BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) adalah entitas yang bertanggung jawab atas upaya penanggulangan bencana. Namun, setelah pembentukan BNPB, Bakornas PB dihapuskan.

Saat ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh telah mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan paradigma dari respons darurat menuju pengurangan risiko bencana mulai diterapkan. Ini ditandai dengan dimasukkannya penanganan dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM Aceh) periode 2007-2012, meskipun implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan kerangka kerja *Hyogo Framework for Action* (HFA) 2005-2015.

Dalam rangka implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya pasal 10 dan pasal 100, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu pasal 18, pasal 19, dan pasal 25, serta didukung oleh Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Pemerintah Aceh telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Selain itu, semua kabupaten/kota di wilayah Aceh telah

membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing. Pada tingkat gampong, masyarakat juga mulai menyadari pentingnya pembentukan gampong siaga bencana.

BPBA adalah lembaga yang kebencanaan di Provinsi Aceh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi terkait pencegahan bencana di wilayah tersebut. Sejak dibentuk pada tanggal 22 Juni 2010, BPBA telah berupaya memenuhi tanggung jawab utamanya dan memberikan layanan penanggulangan bencana dengan kemampuan terbaiknya. Namun masukan dan saran dari berbagai mitra menunjukkan bahwa kualitas layanan tanggap darurat memerlukan peningkatan lebih lanjut, dan beberapa bidang memerlukan perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan.

2. Dasar-Dasar Pembentukan BPBA Provinsi Aceh

- a. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- c. Pepres Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- d. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Perka BNPB Nomor 3 tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- f. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh
- g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- h. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
- i. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh

3. Visi dan Misi BPBA Provinsi Aceh

Berikut Visi dan Misi BPBA Provinsi Aceh:

- a. Visi
“Provinsi Aceh Yang Tangguh Menghadapi Bencana dengan Budaya Sadar Bencana”
- b. Misi
 - 1) Melaksanakan penanggulangan bencana secara menyeluruh, sistematis, dan terencana;
 - 2) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi dalam pembangunan daerah untuk upaya penanggulangan bencana;
 - 3) Melindungi daerah dari ancaman bencana melalui penanganan risiko bencana yang cepat dan tepat;
 - 4) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang terintegrasi, sistematis, terorganisir, tepat, dan harmonis;

5) Memberdayakan masyarakat dengan prinsip memberikan otoritas kepada mereka untuk mengenali risiko bencana yang dihadapi dan mencari solusi terbaik melalui kegiatan pengurangan risiko bencana;

6) Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi pada kesejahteraan petani dan nelayan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;

7) Memberikan perhatian khusus terhadap masalah banjir, termasuk penyusunan masterplan pengendalian banjir, normalisasi sungai, penertiban dan penataan sempadan sungai, pembangunan waduk, pengerukan muara, badan sungai, dan saluran yang menjadi tanggung jawab Provinsi Aceh, serta meningkatkan kerjasama pengendalian banjir dengan pemerintah pusat, terutama untuk daerah-daerah DAS yang menjadi tanggung jawab pusat.

4. Tugas dan Fungsi BPBA Provinsi Aceh

a. Tugas

1) Menetapkan pedoman dan arahan yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk usaha penanggulangan bencana yang mencakup

pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

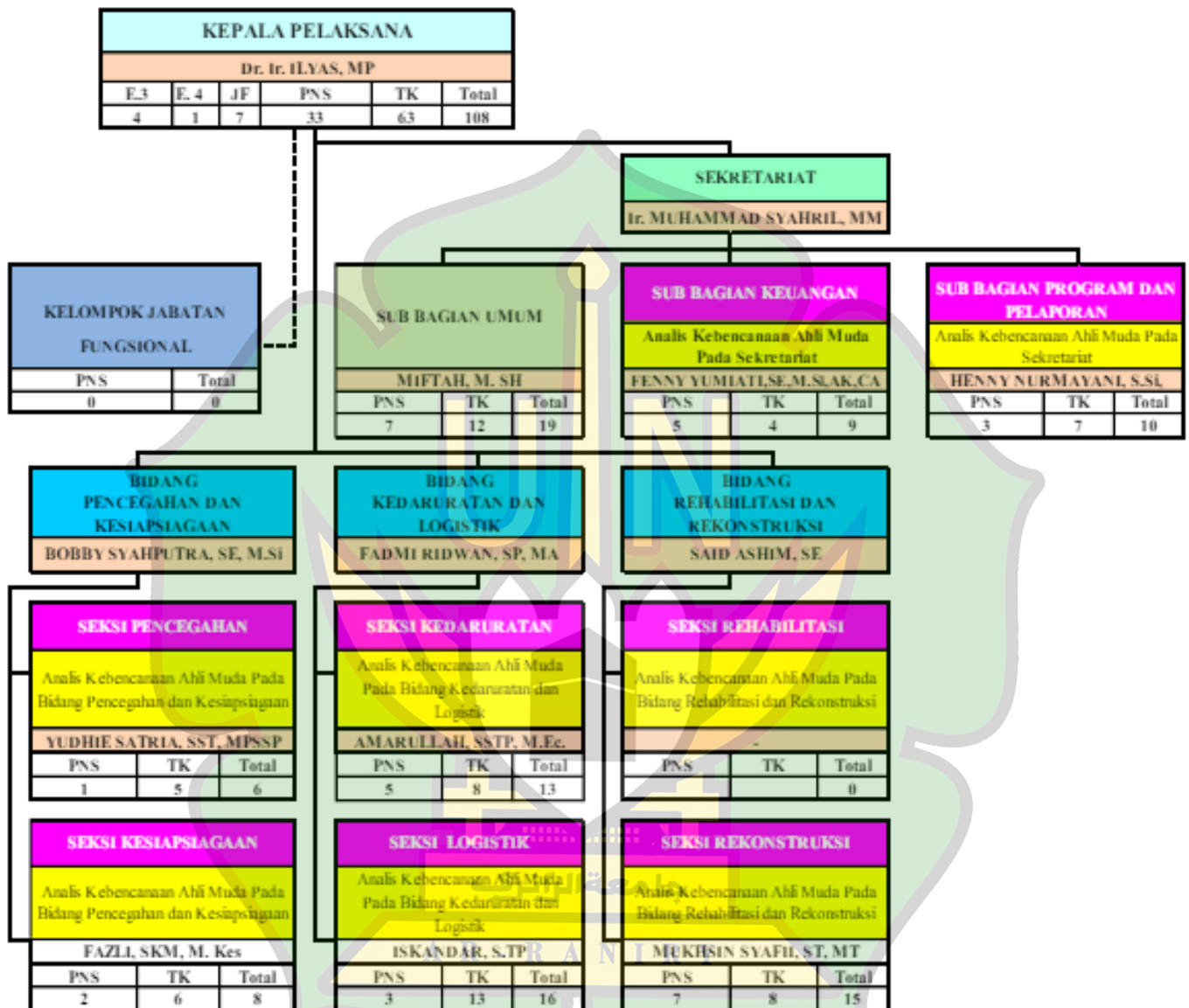
- 2) Menetapkan standar dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menyebarluaskan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap untuk penanganan bencana;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya;
- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan;
- 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber penerimaan lainnya;
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien;
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
 - 3) Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
 - 4) Mengkoordinasikan penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra-bencana dan pasca bencana;
 - 5) Mengkoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari SKPA, instansi vertikal, dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.
5. Struktur Organisasi BPBA Provinsi Aceh

Berikut Struktur organisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh :

Struktur Organisasi BPBA



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

B. Pelaksanaan Program BPBA Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Kota Banda Aceh

Sesuai dengan arahan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi pada setiap lembaga program layanan, Badan Penanggulangan Bencana Aceh beroperasi dengan cara yang sama. Sebagai perangkat daerah, BPBA mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. Dipimpin oleh seorang kepala eksekutif yang bertanggung jawab kepada Gubernur, fokus utama BPBA adalah kegiatan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh adalah sebuah badan pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Badan ini beroperasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi :

“BPBA sendiri berperan melakukan penanggulangan bencana di daerah dari mulai fase pra bencana atau sebelum bencana ya, kemudian juga fase saat bencana atau tanggap darurat, dan kemudian terakhir fase pasca bencana atau setelah bencana yang di dalamnya ada rehabilitasi dan rekonstruksi.”⁵¹

BPBA memiliki peran penting dalam pengurangan resiko bencana kebakaran yang dimana dalam pelaksanaannya Pengurangan resiko ini meliputi proses yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu pra bencana yakni berfokus pada upaya pencegahan dan persiapan sebelum bencana terjadi, saat bencana atau

⁵¹ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, *Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan*, Pada tanggal 21 Maret 2024

memberikan respons cepat dan tanggap terhadap situasi darurat, dan pasca bencana yang dalam kegiatannya terdapat rehabilitasi dan rekonstruksi, mereka terlibat dalam pemulihan ekonomi yang terkena dampak dari bencana kebakaran.

Adapun dalam upaya pengurangan resiko bencana kebakaran ini tentunya BPBA tidak bisa bekerja sendiri, artinya terdapat peran stakeholder atau pihak yang terkait yang ikut turut membantu dalam pengurangan resiko bencana kebakaran. Hal ini seperti wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Fauzi bahwa:

“ Terkait dengan kebakaran, tentu banyak sekali pihak yang terlibat. Di antaranya itu, kita sendiri BPBA, juga ada BPBD. Kalau untuk banda Aceh, dinas damkar ya, lalu TNI/Polri, LSM, dan juga Lembaga swasta juga ikut turun ya terus dinas kesehatan, ada dinas perhubungan, Satpol PP Jadi memang kebakaran ini tidak bisa bekerja secara sendiri, dia melibatkan banyak pihak untuk agar proses-proses ataupun kegiatan-kegiatan penanggulangan kebakaran ini dapat berjalan lancar ya...”⁵²

Dalam melaksanakan perannya, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI/Polri, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga pemerintah lainnya, serta lembaga swasta. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menghadapi bencana Kebakaran.

⁵² Wawancara dengan Ahmad Fauzi, *Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan*, Pada tanggal 21 Maret 2024

Dari hasil wawancara peneliti menemukan, bahwa peran BPBA Provinsi Aceh adalah sebagai koordinator yang mengkoordinir proses pengurangan resiko bencana kabakaran dan dibantu dengan pihak terkait yang dimana dalam proses koordinasinya sebagaimana wawancara :

“Ya selaku instansi ditingkat provinsi, kita terus mengawasi kita mengadakan rapat-rapat koordinasi karna upaya pengurangan resiko bencana dalam kita merumuskan itu melibatkan ya pada sisi Pentahelix atau pun lima sisi pihak penanggulangan bencana bencana, ada lima dia. yang satu itu pemerintah sendiri Kemudian yang kedua itu masyarakat ataupun komunitas masyarakat seperti LSM, organisasi. Yang ketiga itu dunia usaha. Keempat itu akademisi. Dan kelima itu media pers atau wartawan.”⁵³

sebagai instansi di tingkat provinsi, BPBA terus melakukan pengawasan dan mengadakan rapat koordinasi secara berkala. Hal ini dilakukan karena upaya pengurangan risiko bencana melibatkan koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat, seperti yang dikenal dengan konsep Pentahelix atau lima sisi penanggulangan bencana.

Berdasarkan temuan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa mengenai peran BPBA, sesuai dengan teori peran, menurut Edy Suhardono peran didefenisi kan sebagai aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan atau posisi (*status*) seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya, maka orang tersebut telah melaksanakan perannya. Sesuai dengan arahan pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi, setiap lembaga

⁵³ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, *Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan*, Pada tanggal 21 Maret 2024

memiliki program layanan yang ditetapkan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh, BPBA adalah lembaga tingkat provinsi yang memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan terkait penanggulangan bencana di Provinsi Aceh. Dalam hal ini, BPBA memiliki kewenangan khusus untuk mengatur kebijakan mengenai berbagai jenis bencana, termasuk bencana kebakaran. Peran ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Nugroho, yang menyatakan bahwa BPBD berfungsi sebagai pembuat kebijakan (*policy creator*). Dengan demikian, BPBD tidak hanya bertanggung jawab dalam koordinasi penanggulangan bencana, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menetapkan strategi dan kebijakan untuk meminimalkan dampak bencana di wilayah Provinsi Aceh.

Adapun dalam perumusan kebijakan yang strategis, BPBA melaksanakan perannya dalam melakukan pengurangan resiko bencana kebakaran di kota Banda Aceh tentu dengan didukung oleh berbagai pihak-pihak yang terkait. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Suleman terkait peran stakeholder dalam manajemen bencana, dimana dalam pelaksanaannya BPBD memerlukan kontribusi dari pihak-pihak terkait atau stakeholder dalam pengurangan resiko bencana. Tentu Kerjasama itu dilakukan sebagai suatu sistem yang dapat dilakukan secara bersama-sama secara langsung menangani proyek tertentu dan dapat dikerjakan secara tidak langsung yaitu dengan cara saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah.

Dari temuan penelitian yang peneliti dapatkan, bentuk peran yang dilakukan BPBA dalam melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait BPBA melakukan bentuk perannya sesuai dengan salah satu bentuk peran menurut Nugroho bahwa BPBA berperan sebagai koordinator yang berfungsi untuk mengordinasikan aktivitas pengurangan resiko bencana kebakaran dengan lembaga terlibat. Dalam konteks penelitian ini lembaga yang terlibat dalam pengurangan resiko bencana kebakaran diantaranya, BPBD Kota Banda Aceh, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI/Polri, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga pemerintah lainnya, serta lembaga swasta. Adapun Cara BPBD berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu BPBA terus melakukan pengawasan dan mengadakan rapat koordinasi secara berkala. Hal ini dilakukan karena upaya pengurangan risiko bencana melibatkan koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat, seperti yang dikenal dengan konsep Pentahelix atau lima sisi penanggulangan bencana.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa peran BPBA dalam pengurangan resiko bencana kebakaran ada pada dari tiga siklus kebencanaan yakni sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah bencana dimana hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Usiono terkait pelaksanaan pengurangan resiko bencana, yang dimana pengurangan resiko bencana (PRB) merujuk kepada serangkaian langkah-langkah untuk mengurangi resiko bencana secara terorganisir, adapun dalam pengurangan resiko bencana ini diterap kan di tiga siklus kebencanaan.

1. Tahap Pra Bencana

Pra bencana merujuk pada tahap persiapan dan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Ini adalah periode di mana langkah-langkah proaktif diambil untuk mengurangi risiko, mempersiapkan masyarakat, dan membangun kapasitas untuk menghadapi potensi bencana di masa depan. Pencegahan bencana terdiri dari serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memitigasi dan mengelola risiko bencana dengan mengurangi kemungkinan terjadinya bencana dan kerentanan pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak. Fase prabencana terutama menekankan pembangunan kapasitas, dengan fokus pada peningkatan kesiapan individu, kelompok, dan lembaga untuk mengatasi bencana secara efektif.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi :

“Maksud dari pada saat pra bencana, itu dimana terbagi dalam dua. Bisa situasi tidak terjadi bencana, ataupun situasi terdapat potensi bencana. Di antara tugas-tugas yang bisa itu adalah melakukan perencanaan, melakukan upaya pengurangan resiko kebencana, melakukan perencanaan terta ruang. Kemudian, bila sudah terjadi potensi bencana, itu bisa melakukan mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, peringatan dini.”⁵⁴

Dalam masa pra bencana tentu harus melakukan berbagai perencanaan yang matang dalam kesiapsiagaan jika suatu saat terjadinya bencana, sama halnya dalam pengurangan resiko bencana kebakaran. Dengan melakukan tahap pra bencana dengan baik, diharapkan dapat

⁵⁴ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, *Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan*, Pada tanggal 21 Maret 2024

mengurangi kerugian maupun dampak negatif yang disebabkan oleh bencana, serta mengembangkan keahlian individu dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Adapun dalam tahap pra bencana ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPBA yang dimana tentunya pertama ialah edukasi, sebagaimana wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi :

“...Jadi, ada program namanya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, mulai dari seperti kantor, industri, rumah sakit, hotel, maupun sekolah, salah satu program namanya Sekolah/Madrasah Aman Bencana atau SMAB, ini semua bencana kita edukasi namun dilihat dari kerentanannya seperti sekolah kan salah satunya kan kebakaran jadi itu juga masuk dalam pelatihan atau edukasi yang kami berikan kepada warga sekolah...”⁵⁵

Seksi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan juga membenarkan bahwa BPBA memiliki program SMAB yang dilakukan disekolah di Kota Banda Aceh sebagai bentuk edukasi terhadap pencegahan bencana kebakaran. Berdasarkan wawancara dengan seksi bidang Pencegahan bapak Yudhie Satria :

“...Untuk yang kepada masyarakat seingat saya ada program SMAB ya itu juga program edukasi dari kami terkait pencegahan kebencanaan salah satu nya juga kebakaran yang dilaksanakan di sekolah seperti tahun 2023 kemaren kan di sekolah MAN 1 Banda Aceh kan ya...”⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, *Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan*, Pada tanggal 2 April 2024

⁵⁶ Wawancara dengan Yudhie Satria, *Seksi Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan*, Pada tanggal 25 Maret 2024



Gambar 4. 2 Program SMAB di Sekolah MAN 1 Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan bukti dokumentasi kegiatan bahwasanya telah adanya pemenuhan program mitigasi kebencanaan yang dimana yang mana hal ini diperuntukkan bagi warga sekolah untuk proses kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,yang diantaranya bencana kebakaran, program ini sebagai bentuk upaya pengurangan resiko bencana kebakaran yang dimana dalam program ini nantinya terdapat penyuluhan, edukasi dan juga simulasi jika terjadinya bencana kebakaran.

Selanjutnya tidak hanya kepada edukasi yang secara langsung, namun juga BPBA melakukan edukasi tidak secara langsung dengan memasang spanduk atau baliho tentang pencegahan kebakaran ditempat-tempat strategis di Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana wawancara dengan seksi bagian Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan :

“Palingan kita memasang baliho-baliho tentang pencegahan kebakaran ya seperti di simpang lima itu kan, meski sebenarnya bukan hanya kebakaran pemukiman tapi juga karhutla.”⁵⁷

Hal ini sebagaimana telah di sampaikan juga oleh Bapak Yudhie Satria berdasarkan wawancara bahwa memang BPBA pernah membuat spanduk tentang pencegahan kebakaran dalam bentuk langkah langkah pencegahan, adapun spanduk tersebut di letakkan di beberapa titik di Kota Banda Aceh.⁵⁸

Selanjutnya pada tahapan pra bencana BPBA juga ikut serta dalam mensupport dan memfasilitasi alat-alat pemadam kebakaran kepada BPBD Kota Banda Aceh. Hal ini disampaikan bapak Ahmad Fauzi saat wawancara sebagai berikut:

“Kita sudah mensupport, kita sudah menghubungkan beberapa peralatan, seperti mobil damkar , juga mobil tangki air untuk mensupport apabila ada kebakaran. dan juga Peralatan lainnya juga kita sudah hibahkan seperti, selang pemadam, kemudian nozzle, kemudian pakaian petugas kebakaran, kemudian tandon air, ada juga helm pemadam kebakaran, sarung tangan kebakaran, dan ada sepatu khusus untuk pemadam kebakaran. Jadi kita support dari sisi sarana dan prasana lainnya”⁵⁹

⁵⁷ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, *Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan*, Pada tanggal 21 Maret 2024

⁵⁸ Wawancara dengan Yudhie Satria, *Seksi Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan*, Pada tanggal 25 Maret 2024

⁵⁹ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, *Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan*, Pada tanggal 21 Maret 2024

Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seksi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat wawancara bahwa memang BPBA mensupport dalam bentuk memfasilitasi BPBD Kota Banda Aceh dalam memberikan peralatan pemadam kebakaran.⁶⁰



Gambar 4. 3 Pemberian peralatan pemadam kebakaran kepada BPBD Kota Banda Aceh



Gambar 4. 4 Pemberian Mobil Pemadam kebakaran Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dokumentasi diatas terlihat bahwa pada fase pra bencana, BPBA memberikan dukungan kepada BPBD Kota Banda Aceh dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran. Dukungan ini meliputi penyediaan peralatan seperti mobil pemadam kebakaran, selang pemadam, nozzle, pakaian pemadam kebakaran, tandon air, sarung tangan, helm, dan sepatu pemadam kebakaran. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan BPBD Kota Banda Aceh dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi

⁶⁰ Wawancara dengan Yudhie Satria, *Seksi Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan*, Pada tanggal 25 Maret 2024

potensi kebakaran serta merespons dengan lebih efektif dan efisien dalam situasi darurat.

Selain membantu memfasilitasi dari segi sarana dan prasarana BPBA juga membantu para personel pemadam kebakaran dan meningkatkan keterampilan dalam pemadaman kebakaran, hal ini sebagaimana di katakan oleh bapak Fazli pada saat wawancara sebagai berikut.

“...Di saya sendiri sudah pernah membuat pelatihan BIMTEK. Pemadam Kebakaran Tiga Regional di Aceh. Kita buat di Banda Aceh, ini artinya kan memberikan keterampilan juga, pemahaman juga kepada petugas-petugas yang terlibat dengan pemadam di Kota Banda Aceh...”⁶¹

Apa yang disampaikan oleh seksi bidang pencegahan tersebut pun sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Yudhie Satria bahwa BPBA juga membantu memberikan pelatihan kepada personel BPBD Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang didalamnya juga terdapat Kota Banda Aceh.⁶²

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh bapak Ahmad Fauzi sebagaimana wawancara berikut :

“...Maka dari itu kita terus men-support tim-tim dari BBDP atau Dinas Damkar di Kabupaten/Kota dengan melakukan pelatihan-pelatihan terkait pemadam kebakaran”⁶³

⁶¹ Wawancara dengan Fazli, *Seksi Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan*, Pada tanggal 25 Maret 2024

⁶² Wawancara dengan Yudhie Satria, *Seksi Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan*, Pada tanggal 25 Maret 2024

⁶³ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, *Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan*, Pada tanggal 21 Maret 2024

Dari wawancara diatas bahwa pada tahap pra bencana, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) secara konsisten mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota Di Aceh termasuk didalamnya ialah Kota Banda Aceh, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana maupun dalam pengembangan sumber daya manusia. Dukungan tersebut mencakup penyediaan perlengkapan dan fasilitas untuk penanggulangan kebakaran serta penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang berfokus pada pemahaman dan keterampilan terkait kebakaran dalam memperkuat kapasitasnya menghadapi risiko bencana kebakaran serta meningkatkan kesiapan personil dalam merespons bencana.

Berdasarkan data temuan tersebut peneliti menemukan bahwa dalam tahap pra bencana ini ada beberapa tahapan yang di lakukan oleh BPBA dalam upaya pengurangan resiko bencana diantaranya ada memberi edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan awal kebakaraan, adapun edukasi ini terbagi menjadi dua yakni edukasi secara langsung yang dimana edukasi secara langsung ini berbentuk pelatihan tentang penanganan kebakaran pada anak sekolah. BPBA memiliki program yakni program sekolah/madrasah aman bencana (SMAB).

Program ini merupakan sistem edukasi berbasis pelatihan dan edukasi kepada siswa sekolah tentang cara pencegahan bencana terutama kebakaran. Program edukasi kebencanaan kepada anak didik sekolah ini pun sejalan dengan hasil penelitian dari Bambang Irawan, Dkk bahwa upaya dalam pencegahan bencana kebakaran itu melalui pengembangan

budaya sadar bencana dengan program pendidikan dan pelatihan mulai sejak dini. Selanjutnya berdasarkan data temuan dan observasi peneliti BPBA juga terlibat dalam edukasi secara tidak langsung kepada masyarakat, yakni dengan membuat spanduk tentang pencegahan kebakaran di berbagai tempat strategis di Kota Banda Aceh

Penemuan selanjutnya dalam pengurangan resiko bencana kebakaran yang dilakukan oleh BPBA pada tahap pra bencana ialah membantu memfasilitasi BPBD Kota Banda Aceh dan membantu meningkatkan kualitas personel Pemadam Kebakaran. Dalam memfasilitasi BPBD Kota Banda Aceh ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nugroho bahwa BPBD berperan sebagai fasilitator yang berfungsi untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan dalam pengurangan resiko bencana. Adapun fasilitas yang dibantu oleh BPBA diantaranya memberikan mobil pemadam kebakaran selanjutnya memberikan peralatan-peralatan Pemadam kebakaran seperti, selang pemadam, nozzle, pakaian pemadam kebakaran, tandon air, sarung tangan, helm, dan sepatu pemadam kebakaran. Dan selanjutnya ialah BPBA memiliki program untuk meningkatkan kemampuan para personel pemadam kebakaran dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan para personel agar dapat lebih maksimal dalam menangani bencana kebakaran melalui program BIMTEK yang di selenggarakan oleh BPBA. Pernyataan ini pun sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari Eka Septianti bahwa strategi sumber daya melibatkan pelaksanaan

pelatihan dan Bimtek guna meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam pemadam kebakaran.

2. Tahap Saat Bencana

Fase Saat bencana menunjukkan jangka waktu terjadinya bencana atau keadaan darurat, sehingga memerlukan serangkaian tindakan dan tindakan untuk mengatasi dan mengelola keadaan darurat yang diakibatkannya. Tanggap darurat pada fase ini memerlukan kolaborasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang beragam. Elemen kunci dalam mengelola situasi darurat akibat bencana mencakup kesiapsiagaan, respons cepat, dan upaya kolaboratif yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan perlindungan masyarakat. Inisiatif dilakukan untuk mengatasi situasi darurat, meminimalkan dampak bencana, dan memulihkan keamanan dan ketertiban. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Ahmad Fauzi saat wawancara sebagai berikut :

“Fase saat bencana, itu ada beberapa hal yang utama. Di antaranya adalah, melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda. Selanjutnya juga, melakukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar terhadap korban. Kemudian ada lagi, melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi. Itu juga dilakukan di saat itu. Kemudian, melakukan pemulihan sarana dan prasarana, seperti jalan, jembatan, listrik, dan sebagainya”⁶⁴

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) memiliki bidang kedaruratan dan logistik yang berperan penting dalam menghadapi situasi

⁶⁴ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, *Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan*, Pada tanggal 21 Maret 2024

darurat. Dalam pelaksanaannya, bidang tersebut selalu siap 24 jam untuk memantau dan menerima informasi saat terjadinya bencana kebakaran. Dalam bidang kedaruratan dan logistik ini, terdapat sub-bidang yang disebut Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS), yang menjadi ujung tombak BPBA dalam fase tanggap darurat. PUSDALOPS bertugas sebagai pusat koordinasi dan pengendalian operasi saat terjadi bencana. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi tentang situasi bencana, serta mengoordinasikan respon darurat yang diperlukan. Sebagai pusat komando dan kontrol, pusdalops memiliki peran kunci dalam menyatukan upaya penanggulangan bencana dari berbagai pihak, termasuk instansi terkait, relawan, dan masyarakat. Dengan demikian, pusdalops menjadi tulang punggung dalam mengoordinasikan.

Seperti yang dikatakan oleh seksi bidang kedaruratan dan logistik sebagai berikut :

“...Jadi kita dalam bidang ini akan terima laporan dari daerah dari kabupaten kota, makanya kami ini kan 24 jam memantau disini biasanya setiap ada bencana dari kabupaten kota akan masuk laporan terkait bencana ya salah satunya bencana kebakaran juga...”⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Amirullah, *Seksi Bidang Kedaruratan dan Logistik*, Pada tanggal 01 April 2024



Gambar 4. 5 Petugas Pusdalops yang siaga 24 Jam

Berdasarkan wawancara, dan observasi peneliti, dapat di sampaikan bahwa dalam fase kedaruratan BPBA akan siaga 24 jam memantau dan menerima laporan terkait bencana dari masing-masing Kabupaten/Kota, selanjutnya jika terjadi bencana kebakaran maka BPBD Kota Banda Aceh akan menginformasikan kepada BPBA melalui Pusdalops dan nantinya Pusdalops akan melaporkan kejadian tersebut ke bagian kepala pelaksana BPBA untuk dilakukannya kebijakan terkait bencana kebakaran tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Amirullah sebagai berikut :

“Jadi tadinya misalnya dapat informasi dari posdalops dan dilihat nanti ini skala bencananya apakah harus dibantu oleh provinsi atau mungkin cukup ditangani dari pemerintah kabupaten/kota misalnya nanti ada kebakaran 1 atau 2 rumah jadi kita tidak perlu ikut turun langsung kalau misalnya ada kebakaran, paling kita cuma verifikasi ke lokasi kalau memang misalnya kebakaran dibutuhkan bantuan”.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Amirullah, *Seksi Bidang Kedaruratan dan Logistik*, Pada tanggal 01 April 2024

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa informasi yang disediakan oleh Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) dijadikan acuan dalam menentukan skala dan tingkat keparahan kebakaran. Apabila kebakaran memiliki skala kecil, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) akan mengirimkan tim verifikasi cepat untuk melakukan evaluasi kerusakan dan menentukan kebutuhan bantuan darurat yang diperlukan untuk fase respons awal. Namun, jika kebakaran skala besar, BPBA akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan dan koordinasi dalam penanganan bencana kebakaran.

Sebagai contoh, kasus kebakaran di Suzuya Mall di Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, menjadi salah satu kejadian di mana BPBA turut serta dalam upaya pemadaman api. Dalam situasi tersebut, BPBA berperan aktif dalam menyediakan bantuan dan mengkoordinasikan respons darurat bersama instansi terkait lainnya.

Hal ini seperti yang di katakan oleh Seksi Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai berikut :

“...salah satu yang saya ingat pada saat Suzuya ya, kita kan ada mobil supply air ini, sehingga pas kejadian Suzuya itu kita ada ikut turun pada saat itu , tapi kalau secara personil sebenarnya apalagi di sini yang petugas piket biasa mereka juga kalau ada bencana kebakaran, mereka juga ikut turun walaupun hanya sekedar pendatang meski tiadak membawa peralatan karna hanya personilnya kalau yang Suzuya kan, kebakaran sudah besar jadi

memang perlu tambahan supply air jadi kita perlu turunkan tanki air”⁶⁷



Gambar 4. 6 Proses Pemadaman Api di Suzuya

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diatas dapat dikatakan bahwa meski sebenarnya BPBA dalam pelaksanaannya tidak terjun langsung kelapangan namun jika kebakarannya masif dalam artian berskala besar maka BPBA akan ikut turut membantu personel pemadam kebakaran dalam memadamkan api, seperti halnya kejadian kebakaran suzuya pada tahun 2022 silam, BPBA ikut serta dalam membantu damkar

Dari data diatas peneliti menemukan dalam pengurangan resiko bencana kebakaran yang dilakukan oleh BPBA pada saat terjadi bencana, merujuk pada periode di mana bencana sedang terjadi atau dalam keadaan darurat. Fase ini melibatkan serangkaian tindakan dan langkah untuk merespons dan mengatasi situasi darurat yang muncul akibat bencana.

⁶⁷ Wawancara dengan Amirullah, *Seksi Bidang Kedaruratan dan Logistik*, Pada tanggal 01 April 2024

Dalam upaya mengurangi dampak kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menerapkan sistem informasi terkait data bencana, khususnya kebakaran. Dalam bidang kedaruratan dan logistik, terdapat satu bidang yang disebut Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS), yang bertugas sebagai tim siaga untuk menerima segala informasi terkait kebencanaan di Kabupaten/Kota. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Eka Septiani, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang menggunakan teknologi untuk menyediakan data dan informasi terkait kebencanaan, khususnya kebakaran, sangat penting.

Selanjutnya, dari data yang diperoleh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) turut serta dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran di Kota Banda Aceh. Ketika kebakaran terjadi dalam skala besar, BPBA akan terlibat aktif dalam membantu memadamkan api guna mempercepat proses penanganan kebakaran. Salah satu contoh kebakaran yang melibatkan BPBA adalah kebakaran di Mall Suzuya pada tahun 2021. Pada saat itu, BPBA ikut berperan dalam proses pemadaman api.

Tindakan BPBA dalam membantu penanganan kebakaran sejalan dengan konsep yang disampaikan oleh Nugroho, yang menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai akselerator. BPBD bertanggung jawab untuk mempercepat dan

memberikan kontribusi agar program penanggulangan bencana dapat mencapai sasaran dengan waktu yang cepat.

3. Tahap Pasca Bencana

Tahap pasca bencana merupakan fase dimana setelah bencana yang dimana meliputi rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan berbagai layanan publik atau masyarakat hingga mencapai tingkat yang memadai di wilayah yang telah mengalami bencana, dengan fokus utama untuk memulihkan dan menjalankan kembali secara normal segala aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat setelah bencana. Program rehabilitasi pasca bencana kebakaran yang dilakukan oleh BPBA menjadi fokus penelitian selanjutnya untuk memahami bagaimana BPBA menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Mukhsin Syafii sebagai seksi bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi:

“Kebakaran ini kita lebih kedampak. Kadang nggak semua. Ini kan sifatnya kalau kita ini, sifatnya adalah memberikan penguatan, penampingan yang dilakukan dalam bentuk bantuan penguatan ekonomi”⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa dalam tahap pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) turut serta

⁶⁸ Wawancara dengan Mukhsin Syafii, *Seksi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi*, Pada tanggal 26 Maret 2024

dalam upaya pemulihan ekonomi bagi korban bencana kebakaran. Dalam pelaksanaannya, BPBA bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh, yang bertanggung jawab mulai dari pemadaman api hingga masa panik.

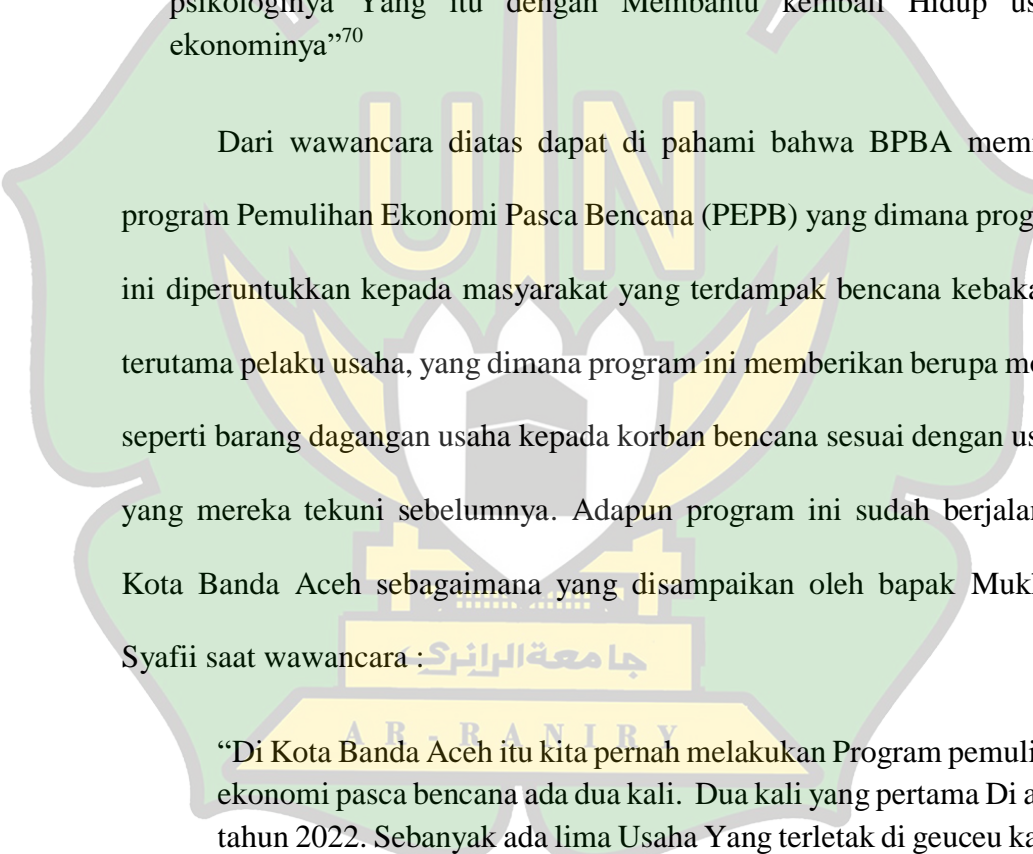
Setelah kebakaran berakhir, tim BPBD akan melakukan verifikasi untuk menentukan dampak kebakaran terhadap berbagai aspek, termasuk pelaku usaha. Jika yang terdampak adalah pelaku usaha, BPBA akan memberikan bantuan untuk memulihkan ekonomi mereka. Hal ini dilakukan dengan menyediakan berbagai program pemulihan ekonomi. Dengan demikian, melalui kerjasama antara BPBA dan BPBD Kota Banda Aceh, upaya pemulihan ekonomi bagi korban bencana kebakaran dapat dilaksanakan secara terstruktur dan efektif, dengan tujuan membantu korban kembali membangun keberlanjutan ekonomi mereka setelah mengalami kerugian akibat bencana. Hal ini pun sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mukhsin Syafii saat wawancara sebagai berikut :

“Ya kan Setelah mereka melakukan penanganan, pemadaman, segala macam. Kemudian terjadinya kan dampak terhadap korban. Korban ditangani sejak masa panik. Kemudian setelah masa panik, diidentifikasi kerusakan. Salah satu kerusakan yang berdampak adalah usaha usaha masyarakat. Kemudian, usaha masyarakat ini ditindak langsung supaya bisa dipulihkan.”⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Mukhsin Syafii, *Seksi Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi*, Pada tanggal 26 Maret 2024

Selanjutnya seksi bidang rehabilitasi dan rekontruksi pun menyampaikan saat wawancara sebagai berikut :

“...Jadi Dampak terhadap kebakaran ini Menimbulkan dampak terhadap usaha ekonomi masyarakat. Akibat kebakaran Maka disinilah BPBA memiliki program, Program namanya pemulihan ekonomi pasca bencana, Jadi Program pemulihan ekonomi ini Adalah Sifatnya kan pemulihan Pasca bencana Khususnya adalah. Kepada masyarakatnya agar masyarakatnya bagaimana supaya Bisa pulih. dan Bisa kembali beraktivitas seperti sediakala. Dalam satu upaya memulihkan psikologinya Yang itu dengan Membantu kembali Hidup usaha ekonominya”⁷⁰

Dari wawancara diatas dapat di pahami bahwa BPBA memiliki program Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana (PEPB) yang dimana program ini diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak bencana kebakaran terutama pelaku usaha, yang dimana program ini memberikan berupa modal seperti barang dagangan usaha kepada korban bencana sesuai dengan usaha yang mereka tekuni sebelumnya. Adapun program ini sudah berjalan di Kota Banda Aceh sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mukhsin Syafii saat wawancara : 

“Di Kota Banda Aceh itu kita pernah melakukan Program pemulihan ekonomi pasca bencana ada dua kali. Dua kali yang pertama Di awal tahun 2022. Sebanyak ada lima Usaha Yang terletak di geuceu kayee jato Kota Banda Aceh. Kecamatan Banda Raya. Kemudian Selanjutnya diakhir Di penghujung tahun 2022. Itu Pasca kebakaran di Lambhuk kecamatan ulee kareng itu ada dua jenis usaha yang dibantu Dan dilaksanakan pada Awal tahun 2023.”⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Mukhsin Syafii, *Seksi Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi*, Pada tanggal 26 Maret 2024

⁷¹ Wawancara dengan Mukhsin Syafii, *Seksi Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi*, Pada tanggal 26 Maret 2024



Gambar 4.7 Pemberian PEPB Tahun 2023 di Kecamatan Ulee Kareng



Gambar 4.8 Pemberian PEPB Tahun 2022 di Kecamatan Banda Raya

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi diatas, bahwa BPBA memiliki peran dalam pengurangan resiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh dimana dengan ada nya program Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana (PEPB) dapat membantu memulihkan kembali ekonomi. Hal ini pun sebagaimana yang di sampaikan oleh masyarakat yaitu bapak Junaidi sebagai pelaku usaha Kios Kelontong yang terdampak bencana kebakaran di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng sebagai berikut:

“...sangat membantu ya kalau ada, biar guna. Kalau ada, membantu, sangat membantu. Karena kita kan selalu membutuhkan waktu itu, karena nggak ada bantuan selain dari Pemerintah dan orang orang kan...”⁷²

⁷² Wawancara dengan masyarakat yaitu, Bapak Junaidi yang terdampak Kebakaran di Gampong Lambhuk, Pada tanggal 29 Maret 2024

Berdasarkan wawancara dengan bapak Junaidi di atas terlihat bahwa program PEPB ini sangat membantu sekali bagi pedagang UMKM yang terkena dampak dari bencana kebakaran.



Gambar 4.9 Suasana Toko Kelontong Milik Pak Junaidi

Selanjutnya Ibu Irawati seorang pelaku usaha kelontong selaku korban kebakaran di Gampong Geuceu Iniem kecamatan Banda Raya pun membenarkan bahwa PPBA memiliki program PEPB yang dimana dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa sangat terbantu dengan adanya program ini, karna dengan adanya program ini toko kelontong miliknya dapat berjalan kembali sejak pasca bencana kebakaran.⁷³



Gambar 4.10 Suasana Toko Kelontong Milik Ibu Irawati

⁷³ Wawancara dengan masyarakat yaitu, Ibu Irawati yang terdampak Kebakaran di Gampong Geuceu Iniem, Pada tanggal 01 April 2024

Berdasarkan hasil temuan melalui observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa tahapan Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana kebakaran yang dikerjakan oleh BPBA merupakan langkah yang penting untuk mendukung transformasi masyarakat, sesuai dengan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Adapun diantaranya tahapan PEPB yaitu :

1) Membuat Tim Dan Berkoordinasi Dengan Pihak Terkait

BPBA membentuk sebuah Tim PEPB yang nantinya bertugas saat pelaksanaan selanjutnya berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait mengenai program ini.

“Yang pertama kita di Provinsi itu membentuk sebuah tim. Tim pemulihan ekonomi yang melibatkan terkait dengan perangkat-perangkat atau OPD yang terlibat dalam bidang-bidang pemulihan ekonomi. Seperti dinas perdagangan kemudian dinas pertanian, dinas perikanan, dinas peternakan, kemudian dinas apa tadi perikanan ya kelautan, pertanian dan plus dispektorat. Supaya betul-betul kegiatan ini sesuai dengan sasarannya”⁷⁴

2) Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian.

BPBD Kota Banda Aceh dan berbagai pihak yang bekerja sama dengan koordinasi BPBD bertanggung jawab atas inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan atau kerugian akibat bencana. Verifikasi terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut dapat dilakukan oleh BPBD atas dasar usulan atau masukan yang diterima.

“Semua ini sumber informasi dan usulannya dari Kabupaten. jadi disana kita sebagai pelaksananya adalah BPBD. selaku mitra kita di Kabupaten. BPBD lah yang melakukan kajian dari tahap

⁷⁴ Wawancara dengan Mukhsin Syafii, *Seksi Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi*, Pada tanggal 26 Maret 2024

inventarisasi kerusakan dan kemudian selanjutnya dia menyusun namanya kajian kebutuhan pasca bencana”⁷⁵

3) Perencanaan dan Penetapan Prioritas.

Selanjutnya tahap perencanaan yang dimana dalam menentukan kan dengan melihan dan mengkaji apakah korban tersebut layak untuk di bantu dan bantuan semacam apa yang dibutuhkan oleh korban kebakaran tersebut.

“...Dari hasil kajian kebutuhan pasca bencana itu disitulah terdapat misalnya kerusakan akibat dari bencana kebakaran yang berdampak kepada ekonomi. Ekonomi khususnya ekonomi produktif masyarakat. Maka dari situlah dilakukan pendataan pendalaman kepemilikan. Jadi betul-betul tepat sasaran. jadi dilihat dari data by neme by addressnya. atau berdasarkan data kependudukannya. sehingga betul-betul tepat sasaran.”⁷⁶

4) Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana (PEPB)

Pelaksanaan rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan dan pemulihan ekonomi pasca bencana yang dimana nantinya korban kebakaran akan dibantu dalam bentuk modal yakni barang atau peralatan yang di perjualkan sebelum kebakaran.

“Kemudian masyarakat membuat secara sederhana tempat usahanya. kita di sini membantu adalah modal. Tapi dalam bentuk peralatan dan barang seperti apa usaha sebelumnya yang dia lakukan.”⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan Mukhsin Syafii, *Seksi Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi*, Pada tanggal 26 Maret 2024

⁷⁶ Wawancara dengan Mukhsin Syafii, *Seksi Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi*, Pada tanggal 26 Maret 2024

⁷⁷ Wawancara dengan Mukhsin Syafii, *Seksi Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi*, Pada tanggal 26 Maret 2024

Selain dari pada pemulihan ekonomi pasca bencana tentunya pada saat pasca bencana para korban yang terdampak tentu mengalami kerugian harta benda yang tidak sedikit yang mana hal ini tentu berpengaruh terhadap psikologis korban. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh korban bencana kebakaran di Gampong Lambhuk pada saat wawancara sebagai berikut :

“Kalau kerugiannya banyak lah, kerugian material, segala sesuatu lah. Karena kita semua di sini, termasuk yang semua lah karena sudah tinggal di sini, sudah semua harta benda di sini.”⁷⁸”

Hal ini pun dirasakan juga oleh ibu Irawati di gampong Geuceu Iniem pada saat wawancara ibu mengatakan semua harta benda terbakar semua termasuk tabungan juga ikut terbakar, tentu hal ini sangat berdampak buruk pada kondisi mental para korban bencana kebakaran, maka perlu adanya bantuan psikososial.⁷⁹

BPBA sendiri dalam hal pemulihan Psikososial tentu tidak turun langsung kelapangan namun dalam hal ini BPBA membantu memfasilitasi personel BPBD Kota Banda Aceh dan para relawan psikososial dengan membuat pelatihan pemulihan psikososial pada korban bencana. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Mukhsin Syafii saat diwawancarai sebagai berikut :

⁷⁸ Wawancara dengan masyarakat yaitu, Bapak Junaidi yang terdampak Kebakaran di Gampong Lambhuk, Pada tanggal 29 Maret 2024

⁷⁹ Wawancara dengan masyarakat yaitu, Ibu Irawati yang terdampak Kebakaran di Gampong Geuceu Iniem, Pada tanggal 01 April 2024

“Peran kita adalah memperkuat kapasitasnya petugas dan relawan yaitu melakukan namanya Workshop atau BIMTEK psikososial bagi korban masyarakat yang tertimpa bencana Itu dipusatkan, dilatih Dengan menggunakan dana Provinsi. Kita pesertanya adalah dari BPBD, Kabupaten Kota, Atau relawan-relawan yang bergerak di bidang psikososial yang menangani pasca trauma akibat bencana.⁸⁰”



Gambar 4. 11: BIMTEK Psikososial Bagi Korban Bencana

Dari penjelasan wawancara dan bukti dokumentasi diatas dapat dipahami bahwa peran utama BPBA adalah memperkuat kapasitas petugas dan relawan dalam menangani aspek psikososial bagi korban bencana dengan membuat kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang fokus pada pemulihan psikososial. Program ini didanai oleh pemerintah provinsi dan diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. BIMTEK ini difokuskan pada pelatihan psikososial bagi masyarakat yang terdampak bencana, yang bertujuan untuk membantu mereka mengatasi trauma dan

⁸⁰ Wawancara dengan Mukhsin Syafii, ST, MT, Seksi Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi, Pada tanggal 26 Maret 2024

stres pasca-bencana. Pesertanya berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik dari tingkat kabupaten maupun kota, serta relawan yang aktif di bidang psikososial. Mereka akan dilatih dalam penanganan pasca-trauma dan upaya pemulihan psikososial yang efektif bagi korban bencana.

Dari data diatas peneliti menyimpulkan berdasarkan Penemuan yang peneliti temukan bahwa dalam pengurangan resiko bencana kebakaran yang dilakukan oleh BPBA ialah pada saat pasca bencana BPBA memiliki peran penting dalam mengurangi dampak yang di timbulkan pada saat setelah bencana terjadi, adapun dalam pelaksanaannya BPBA memiliki pogram pemulihan ekonomi pasca bencana (PEPB). Program ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha UMKM yang terkena dampak kebakaran, dengan memberikan bantuan berupa modal barang dagangan sesuai dengan usaha yang dijalankan sebelum bencana kebakaran.

Adapun berdasarkan data yang ditemukan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh BPBA dalam melaksanakan Program pemulihan ekonomi pasca bencana diantaranya :

- 1) Membuat Tim Dan Berkoordinasi Dengan Pihak Terkait

BPBA membentuk sebuah Tim PEPB yang nantinya bertugas saat pelaksanaan selanjutnya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai program ini. pihak terkait tersebut diantaranya : Dinas

perdagangan, dinas Pertanian, dinas perikanan, dinas peternakan, dan inspektorat

2) Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian.

BPBD Kota Banda Aceh dan berbagai pihak yang bekerja sama dengan koordinasi BPBD bertanggung jawab atas inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan atau kerugian akibat bencana. Verifikasi terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut dapat dilakukan oleh BPBD atas dasar usulan atau masukan yang diterima.

3) Perencanaan dan Penetapan Prioritas

Tahap perencanaan yang dimana dalam menentukan kan dengan melihan dan mengkaji apakah korban tersebut layak untuk di bantu dan bantuan semacam apa yang dibutuhkan oleh korban kebakaran tersebut.

4) Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana (PEPB)

Pelaksanaan rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan dan pemulihan ekonomi pasca bencana yang dimana nantinya korban kebakaran akan dibantu dalam bentuk modal yakni barang atau peralatan yang di perjualkan sebelum kebakaran.

Dimana dari ke empat cara tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Dea Riska bahwa BPBD memiliki peran utama dalam pelaksanaan rehabilitasi atau pemilihan dan rekontruksi pada pasca bencana dimana BPBD berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan korban bencana kebakaran. Hal ini juga sebagaimana yang di sampaikan oleh Nugroho bahwa BPBD berperan

sebagai Implementer yakni bertugas melaksanakan kebijakan termasuk kelompok sasaran (korban bencana kebakaran). Dalam hal ini BPBA melaksanakan program pemulihan ekonomi pasca bencana.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan diketahui juga bahwa dampak setelah terjadi bencana kebakaran yang dirasakan oleh korban kebakaran di Kota Banda Aceh sesuai dengan pengertian dampak bencana, menurut Nurjanah dkk dampak dari bencana ialah segala sesuatu yang merubah atau merugikan akibat kejadian dari bencana. Dampak yang dirasakan seperti, kerusakan atau kehilangan harta benda, luka-luka, kematian, gangguan gaya hidup, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, kehilangan mata pencaharian, psikologi terganggu, kehilangan rumah, dan gangguan sistem pemerintahan. Dampak bencana sesuai pengertian diatas sangat dirasakan oleh para korban bencana kebakaran di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng dan Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya.

Tentu korban kebakaran ini pun tidak hanya membutuhkan bantuan secara materi namun juga secara psikologis. Berdasarkan data temuan, peneliti penemuan adanya peran BPBA dalam proses pemulihan psikologis korban, namun tidak secara langsung artinya BPBA memberikan peningkatan kualitas para personel BPBD dan Relawan psikososial dengan memberikan pelatihan atau Bimtek psikososial korban bencana, yang nantinya turun kelapangan untuk memulihkan psikologis korban itu menjadi tugas BPBD Kota Banda Aceh. hal ini pun sejalan dengan penelitian dari

Eka Septiani bahwa dalam Pengurangan resiko bencana kebakaran perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dengan melibatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan Bimtek guna meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan kegiatan penanganan.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa adanya beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh BPBA Provinsi Aceh dalam proses pengurangan resiko bencana kebakaran yang dimana diantaranya sebagai berikut :

1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Jika kita melihat kembali bahwa, Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang memiliki potensi rawan terhadap bencana kebakaran pemukiman. Hal ini dikarenakan wilayah Kota Banda Aceh yang tergolong padat penduduk yakni sekitar 257.635 Jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 61,36 km². Ini lah yang menjadikan wilayah Kota Banda Aceh sangat berpotensi terjadinya kebakaran, ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh dalam mencegah terjadinya kebakaran. Hal ini sebagaimana di katakan oleh bapak Yudhie Satria selaku Seksi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan dalam wawancara sebagai berikut :

“...Pemahaman masyarakat tentang kebakaran bahaya kebakaran sendiri terus perilaku masyarakat kultur masyarakat masyarakat ini terus pola pembangunan karena masih banyak yang membangun itu tanpa dapat mempedulikan aspek-aspek selamatan seperti itu dan

kepatuhan masyarakat terhadap melindungi diri sendiri itu masih kurang”⁸¹

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mencegah kebakaran inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam proses pengurangan resiko bencana kebakaran, berdasarkan data kasus kebakaran yang melanda masyarakat Kota Banda Aceh di dominasi oleh arus pendek listrik, hal ini tentu disebabkan oleh kurangnya perawatan instalasi listrik rumah. Sebagaimana yang dikatakan bapak Yudhie Satria dalam wawancara :

“...Untuk menjaga listriknya aja jarang rawat installator listriknya juga jarang dan sering terjadi kan kebakaran karena konslet ya.konslet itu biasanya karena pertama pemasangan installator yang tidak standar yang kedua, mungkin itu instalasinya sudah sudah tua jadi banyak gedung-gedung rumah-rumah itu sudah tua...”⁸²

Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengurangan risiko bencana kebakaran adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam merawat instalasi listrik, yang terbukti dengan dominannya kasus kebakaran di Banda Aceh akibat arus pendek listrik.

- 2) Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan awal kebakaran.

⁸¹ Wawancara dengan Yudhie Satria, *Seksi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan*, Pada tanggal 25 Maret 2024

⁸² Wawancara dengan Yudhie Satria, *Seksi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan*, Pada tanggal 25 Maret 2024

Selain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran, masalah utama lainnya adalah kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran atau dalam melakukan penanganan awal kebakaran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas masyarakat di Kota Banda Aceh masih belum menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di rumah mereka. APAR merupakan perangkat yang sangat penting sebagai langkah awal dalam penanganan kebakaran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Yudhie Satria dalam wawancara :

“Masyarakat kita sendiri belum siap menghadapi kebakaran contohnya masih banyak masyarakat yang belum punya hidrant atau APAR dirumah-rumahan...”⁸³

Dari data diatas peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan awal kebakaran. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas masyarakat masih belum memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di rumah. Padahal, APAR sangat berguna dalam penanganan awal ketika terjadi kebakaran.

3) Kurangnya Sumber Daya Manusia Dan Fasilitas Pemadam Kebakaran di BPBA

Penemuan ketiga ini menunjukkan terbatasnya jumlah sumber daya manusia atau personel yang terlatih dalam bidang kebakaran, serta kurangnya alat, sarana, dan prasarana yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam penanganan kebakaran.

⁸³ Wawancara dengan Yudhie Satria, *Seksi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan*, Pada tanggal 25 Maret 2024

Hal ini menjadi tantangan dan hambatan dalam upaya pengurangan risiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan Amirullah selaku Seksi Bidang Kedaruratan dan Logistik dari BPBA mengatakan bahwa:

“Pertama dari sisi SDM kita atau Sumber daya manusianya yang masih kurang karna yang paling terasa hambatannya ialah sumber dayanya ya yang benar benar terlatih gitu...”⁸⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pengurangan risiko bencana kebakaran adalah kurangnya sumber daya manusia atau personel yang memiliki pemahaman yang cukup tentang penanganan kebakaran. Peneliti sependapat dengan temuan tersebut, di mana keberadaan personel yang terlatih secara memadai dalam penanganan kebakaran menjadi sangat penting dalam upaya mengurangi risiko bencana kebakaran. Personel yang terlatih memiliki peran yang krusial, karena mereka akan dibutuhkan sewaktu-waktu pada saat situasi darurat. Selain itu, keberadaan personel yang terlatih dari BPBA dapat memberikan pelatihan khusus bagi personel Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh di masa yang akan datang.

Selanjutnya bapak Amirullah menambahkan juga pada saat wawancara sebagai berikut :

“...kedua kita juga tidak didukung dengan peralatan yang memadai dan juga anggarannya juga terbatas kita kan nggak seperti

⁸⁴ Wawancara dengan Amirullah, *Seksi Bidang Kedaruratan dan Logistik*, Pada tanggal 01 April 2024

di luar negeri karna kalau di luar negeri kan yah jauh lebih maju kan. Peralatan yang memadai ini sebaiknya perlu, karna kalau pemadam kebakaran pemukiman kan susah nya terbatas dan juga karhutlah juga sama kan “⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan kebakaran di Kota Banda Aceh. Meskipun BPBA merupakan institusi tingkat provinsi, keberadaan alat dan fasilitas untuk penanganan kebakaran perlu diperhatikan agar dapat mendukung pengurangan risiko bencana kebakaran secara optimal.

Dalam banyak kasus, BPBD Provinsi di beberapa Kota Besar di Indonesia telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk mobil pemadam kebakaran. Sarana dan prasarana kebakaran ini tidak hanya berguna untuk penanganan kebakaran di pemukiman, tetapi juga di hutan dan lahan sebagaimana yang disampaikan pada wawancara diatas.

⁸⁵ Wawancara dengan Amirullah, SSTP, M.Ec, *Seksi Bidang Kedaruratan dan Logistik*, Pada tanggal 01 April 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa peran BPBA bertindak sebagai pembuat kebijakan serta koordinator dalam pengurangan resiko bencana kebakaran di Kota Banda Aceh. BPBA bekerja sama dengan BPBD Kota Banda Aceh dan lembaga terkait lainnya. Peneliti menemukan bahwa peran BPBA dalam mengurangi resiko bencana kebakaran terjadi di semua tahap bencana. Pada tahap pra bencana BPBA berperan sebagai *fasilitator* dalam program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan membantu memfasilitasi BPBD Kota Banda Aceh baik secara materil maupun immateril. Pada tahap saat terjadi bencana BPBA berperan sebagai *akselerator* yakni membantu mempercepat penanggulangan bencana kebakarandi Kota Banda Aceh. Dan pada tahap pasca bencana BPBA berperan sebagai *Implementer* dengan ikut serta melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana (PEPB). Selanjutnya selain program pemulihan ekonomi, BPBA juga memiliki program BIMTEK psikososial yang mana program ini bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kapasitas petugas BPBD dan relawan psikososial pada korban bencana. Adapun hambatan yang dalam pengurangan resiko bencana yakni, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran, kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran, dan kurangnya sumberdaya manusia dan fasilitas pemadam kebakaran yang dimiliki BPBA.

B. Saran

Menurut penelitian yang telah dilaksanakan, untuk peran BPBA Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran di Aceh agar lebih progresif kedepannya, peneliti akan menyampaikan saran diantaranya:

1. Meningkatkan Kinerja BPBA Provinsi Aceh dalam mitigasi risiko bencana kebakaran dengan berperan sebagai koordinator yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai tujuan BPBA Provinsi Aceh yang fokus utamanya pada penanggulangan bencana secara efektif.
2. Membantu sebuah tim yang terlatih dalam bidang kebencanaan dan juga meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kebakaran, yang nantinya juga ini sangat berguna dalam meminimalisir risiko bencana baik itu kebakaran pemukiman maupun kebakaran hutan dan lahan
3. Mengingat tanggung jawab BPBA mencakup penanganan bencana mulai dari tahap prabencana hingga pascabencana, maka pada tahap prabencana, BPBA harus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana kebakaran, khususnya di wilayah rawan kebakaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga, mendorong kewaspadaan dan menjaga lingkungan sekitar untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.
Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Adiyoso, Manajemen Bencana Pengantar & Isu-Isu Strategis. Jakarta: Bumi Aksara, 2022
- Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Heddy, Agus Indiyanto, dkk., *Respon Masyarakat Lokal Atas Bencana*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012
- Ismail Suardi, *Mitigasi Bencana*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021).
- Miles, M. B. dan Huberman, A, M, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1992
- M. Djunaidi, dkk, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2012
- Napitupulu P.B.D., *Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran Perusahaan*, Bandung: PT. Alumni, 2015
- Nani, Nurrachman, *Pemulihan Trama: Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam*. LPSP3. UI Jakarta, 2007
- Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi aksara, 2004
- Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana*, Bandung: Alfabeta, 2013,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta : Balai Pustaka, 2007
- Kodoatie, Robert J., dan Sjarief, *Pengelolaan Sumber Bencana Terpadu-Banjir, Longsor, Kekeringan dan Tsunami*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2006

- Purneyenti, Banjir & Kebakaran Bencana Klasik Di Kota Besar, Bandung: Penerbit Duta, 2019
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, *Pedoman Teknis Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB-BK)*, Jakarta : Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementrian Pekerjaan Umum, 2013
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*, Jakarta : BNPB, 2008
- Ramli, Soehatman, *Manajemen Bencana*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010
- Rinanto, *Bencana Kebakaran*, Bandung: Pt.Graha Bandung Kencana, 2017
- Sastradihardja, *Tanggap Bencana Kebakaran*, Bandung: CV. Angkasa, 2021
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Bandung : IKIP, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Usiono dkk, *Disaster Management Perspektif Kesehatan dan Kemanusiaan*, Medan : Perdana Puplicing, 2018
- Usman, Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara, 2009
- Weni R.,Dkk, *Seri Bencana Alam Kebakaran*, Jakarta: PT. Mediantara Semesta, 2009

"Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023" Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2023

Sumber Jurnal :

Asep, P , dkk , ‘Kerentanan Bahaya Kebakaran Di Kawasan Kampung Kota Kasus: Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung ’, *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 2.1 (2019), 32–45.

Bambang Irawan, dkk , ‘Mitigasi Bencana Kebakaran Kawasan Perkotaan’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 14.4 (2023), 476.

Eka Septianti Laoli, Okniel Zebua, and Peringatan Harefa, ‘Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mengurangi Resiko Bencana Kebakaran Di Wilayah Kabupaten Nias’, *Jurnal Manajemen*, 1.3 (2022),

Suleman, S. A., & Apsari, N. C. Peran stakeholder dalam manajemen bencana banjir. *Prosiding Pesnelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1),(2017) 53-59.

Sumber Web :

Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Aceh”,
<https://bpba.acehprov.go.id/halaman/sejarah-badan-penanggulangan-bencana-aceh>
 (diakses pada 04 Februari 2024)

“Peringatan Bulan PRB Tahun 2022”, <https://bnpb.go.id/bulanprb2022> (diakses pada 04 Februari 2024).

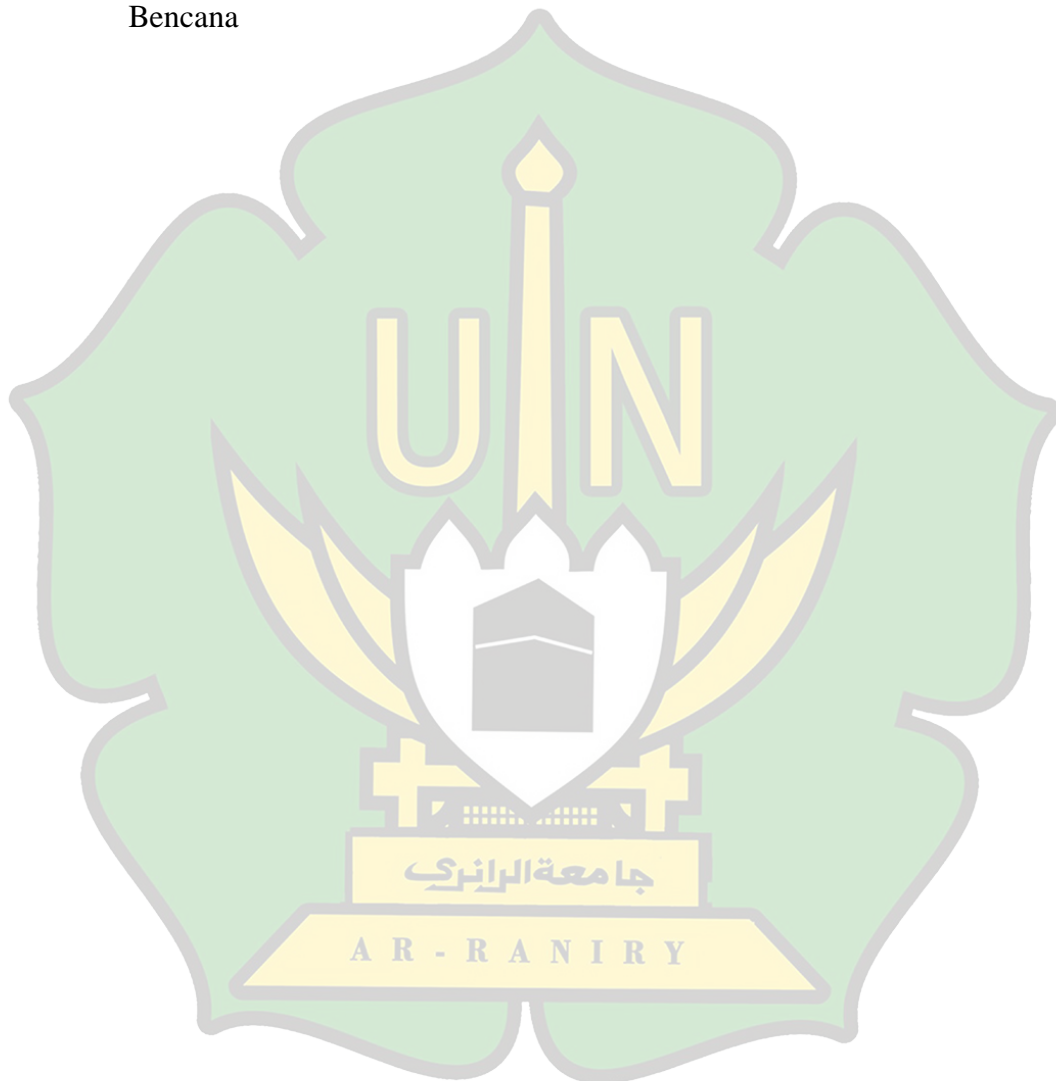
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. *Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Aceh (2022)*.

Regulasi :

UU No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan

Bencana



PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara 1

Teknik : Wawancara, Merekam
Nama Narasumber : Ahmad Fauzi, S.Sos, MM
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan
Waktu : Pukul 10.30 Wib / 21 Maret 2024
Tempat : Kantor (BPBA) Jl.T. Daud Beureueh, No. 18

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi BPBA?
2. Bagaimana peran BPBA provinsi Aceh dalam pengurangan resiko bencana Kebakaran?
3. Bagaimana BPBA melakukan analisis terhadap risiko kebakaran di wilayah Kota Banda Aceh?
4. Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kebakaran dan faktor-faktor pemicu?
5. Apa saja program yang sedang dijalankan BPBA dalam pengurangan resiko bencana kebakaran?
6. Apa kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh BPBA terkait pengurangan risiko bencana kebakaran?
7. Bagaimana Proses perumusan kebijakan terkait PRB apakah melibatkan partisipasi masyarakat atau instansi/pihak-pihak terkait lainnya?
8. Bagaimana BPBA mengkoordinasikan setiap intervensinya terkait PRB kebakaran di Kota Banda Aceh dengan Pihak Instansi BPBD Kota Banda Aceh?
9. Apakah dalam pelaksanaan pada saat penanggulangan bencana kebakaran di Kota Banda Aceh melibatkan pihak pemerintah dan pihak swasta?

Pedoman Wawancara 2

Teknik : Wawancara, Merekam
Nama Narasumber : Yudhie Satria, SST, MPSSP
Jabatan : Seksi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBA
Waktu : Pukul 10.00 Wib / 25 Maret 2024
Tempat : Kantor (BPBA) Jl.T. Daud Beureueh, No. 18

1. Apakah BPBA melakukan penanggulangan Pra bencana di Kota Banda Aceh ?
2. Apa peran dan tanggung jawab utama BPBA dalam mengurangi risiko bencana kebakaran pada tahap pra bencana?
3. Apa saja Program yang sudah dilakukan Oleh BPBA dalam pengurangan resiko bencana kebakaran pada saat pra bencana di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana BPBA melakukan pencegahan dan mitigasi kebakaran pada tahap pra bencana?
5. Apakah ada program pendidikan atau pelatihan kepada masyarakat Kota Banda Aceh agar tau cara pencegahan Kebakaran?
6. Apakah ada program atau inisiatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi kebakaran?
7. Apa saja tantangan/hambatan yang dihadapi oleh BPBA dalam mengurangi risiko bencana kebakaran pada tahap pra bencana?

Pedoman Wawancara 3

Teknik : Wawancara, Merekam
Nama Narasumber : Amirullah, SSTP, M.Ec
Jabatan : Seksi Bidang Kedaruratan Dan Logistik
Waktu : Pukul 14.00 Wib /01 April 2024
Tempat : Kantor Pusdalops BPBA

1. Apakah BPBA melakukan penanggulangan pada saat terjadi bencana di Kota Banda Aceh ?
2. Apa peran dan tanggung jawab utama BPBA dalam mengurangi risiko bencana kebakaran pada saat terjadi kebakaran bencana?
3. Apa saja upaya yang sudah dilakukan Oleh BPBA dalam pengurangan resiko bencana kebakaran pada saat terjadi kebakaran di Kota Banda Aceh?
4. Adakah strategi BPBA dalam menanggulangi bencana kebakaran yang sedang terjadi untuk meminimalkan kerugian korban bencana?
5. Apakah ada beberapa contoh kasus bencana kebakaran yang dimana BPBA terlibat didalamnya dan bagaimana mereka menangani situasi tersebut?
6. Bagaimana BPBA bekerja sama dengan instansi, pemadam kebakaran atau BPBD Kota Banda Aceh pada saat terjadi bencana?
7. Apakah ada prosedur khusus yang ditetapkan untuk memastikan koordinasi yang efektif antarinstansi tersebut?
8. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di BPBA dalam menunjang Kegiatan saat terjadi bencana?
9. Apa saja tantangan/hambatan yang dihadapi oleh BPBA dalam mengurangi risiko bencana kebakaran pada saat terjadi bencana?

Pedoman Wawancara 4

Teknik : Wawancara, Merekam
Nama Narasumber : Iskandar, S.Tp
Jabatan : Seksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Waktu : Pukul 09.00 Wib / 26 Maret 2024
Tempat : Kantor (BPBA) Jl.T. Daud Beureueh, No. 18

1. Apakah BPBA melakukan penanggulangan Pasca bencana di Kota Banda Aceh ?
2. Apa peran utama BPBA dalam mengurangi risiko bencana pada tahap pasca bencana?
3. Apa saja Program rehabilitasi dan rekontruksi yang telah dilakukan oleh BPBA?
4. Bagaimana peran BPBA dalam rehabilitasi dan rekontruksi di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana BPBA memastikan bahwa pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana?
6. Profesi dan pihak apa saja yang bekerjasama dengan BPBA dalam perogram rehabilitasi dan rekontruksi?
7. Apa saja syarat dan ketentuan bagi korban yang menerima rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana?
8. Apa saja tantangan/hambatan yang dihadapi oleh BPBA saat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi?

Pedoman Wawancara 5

Teknik : Wawancara, Merekam
Narasumber : Korban Kebakaran Gampong Lambhuk dan Gampong Geuceu Iniem
Waktu : 29 Maret 2024 - 1 April 2024
Tempat : Kec. Lueng Bata dan Kec. Ulee Kareng

1. Kapan dan apa penyebab terjadinya kebakaran?
2. Bagaimana Kronologi dari kebakaran tersebut?
3. Berapa rumah yang terbakar pada waktu itu?
4. Berapa kerugian materil ?
5. Bagaimana Anda melihat peran BPBA dalam menangani kebakaran dan membantu korban?
6. Apakah BPBA memberikan bantuan atau dukungan setelah kebakaran terjadi?
7. Pihak apa saja yang terlibat dalam membantu proses penanganan bencana kabakaran pada masa itu ?
8. Bagaimana sikap anda dalam proses Pemulihan ekonomi yang dilakukan Oleh BPBA?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN DOKUMENTASI

PENELITIAN



Foto wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, S.Sos, MM



Foto wawancara dengan Bapak Yudhie Satria, SST, MPSSP



Foto wawancara dengan Bapak Fazli, SKM, M.Kes



Foto wawancara dengan Bapak Amirullah, SSTP, M.Ec



Foto wawancara dengan Bapak Iskandar, S.Tp



Foto wawancara dengan Bapak Junaidi



Foto wawancara dengan Ibuk Irawati



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.441/Un.08/FDK-1/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALFAIQ SHIDDIQ ZIKIR / 200405021**
Semester/Jurusan : VIII / Kesejahteraan Sosial
Alamat sekarang : Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA KEBAKARAN (STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Maret 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

Jalan Tgk. Daud Beureuch no.18 Telp / Fax : 0651-34783 e-mail : bpbaceh@gmail.com
Banda Aceh 23121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300.2/354/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alfaiq Shiddiq Zikir
NIM : 200405021
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan pengumpulan data pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 10 Mei 2024 untuk keperluan bahan penulisan tugas akhir di Badan Penanggulangan Bencana Aceh dengan judul skripsi **Peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Dalam Pengurangan Risiko Bencana Kebakaran (Studi Kasus di Kota Banda Aceh).**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat. Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Mei 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
a.n KEPALA PELAKSANA,
SEKRETARIS

MIFTAH. M, SH
PENATA TK. I

NIP. 19680816 199103 1 005

ND. Nomor Peg.800/012 tanggal 27 Mei 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alfaiq Shiddiq Zikir
2. Tempat/Tanggal lahir : Sinabang, 17 Mei 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Nim : 200405021
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Air Dingin
 - a. Kecamatan : Simeulue Timur
 - b. Kabupaten : Simeulue
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/HP : 082276232650

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 7 Simeulue Timur
2. SMP : Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Simeulue
3. SMA : SMK Negeri 1 Sinabang

Orang tua/Wali

1. Nama Ayah : Tarmizi
2. Pekerjaan Ayah A R - R : Nelayan Y
3. Nama Ibu : Misnawati, S.E
4. Pekerjaan Ibu : PNS
5. Alamat Orang Tua : Desa Air Dingin

Banda Aceh, 13 Juli 2024

Alfaiq Shiddiq Zikir